

KETENAGAKERJAAN DALAM DATA

edisi 2

2023



KETENAGAKERJAAN DALAM DATA

EDISI 2 TAHUN 2023

Naskah :
Bidang Pengelolaan Data Ketenagakerjaan

Desain Sampul dan Layout :
Bidang Pengelolaan Data Ketenagakerjaan

Penerbit:
Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan

Redaksi :
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Kav. 51 Jakarta Selatan 12950
Telp : 021 – 5273609
Fax. : 021 – 5273609
Website : <https://satudata.kemnaker.go.id>
Email : pusdatik@kemnaker.go.id

Hak cipta dilindungi undang – undang
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan

TIM PENYUSUN

Editor : Zulfiyandi, S,E
Franciscus Anton Wirawan, S.Si., M.Si
Penulis : Roselina Yolanda, S.Si
Ainul Fatwa Khoiruroh, S.Si
M. Zaini, S.Stat
Devi Andrian, S.Stat
Khairina Syafitri, S.Kom

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Buku Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD) edisi 2 Tahun 2023 ini. Buku KDD merupakan penyajian data ketenagakerjaan yang dipublikasikan secara semesteran untuk memotret dinamika ketenagakerjaan secara priodik dan berkesinambungan. Publikasi buku KDD dua kali dalam setahun ini juga merupakan upaya Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan dalam memenuhi amanat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 Tentang Satu Data Ketenagakerjaan.

Buku KDD ini menyajikan data ketenagakerjaan umum periode Februari 2023 dan data ketenagakerjaan khusus periode semester 2 tahun 2023. Data ketenagakerjaan umum diolah dan bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan data ketenagakerjaan khusus diolah dan bersumber dari hasil kompilasi administratif laporan penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan oleh produsen data ketenagakerjaan, baik intenal maupun eksternal Kemnaker dengan periode laporan sampai dengan Bulan September 2023.

Penyajian dan Publikasi Buku KDD ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam melihat dan menggambarkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Semoga buku KDD ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih kepada pengguna data ketenagakerjaan baik itu pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat terutama bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku KDD ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyusunan buku KDD yang lebih baik pada edisi-edisi selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2023

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan menuntut akurasi perencanaan, evaluasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan. Karena itu, sangat penting bagi kita menerapkan budaya literasi data dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Budaya literasi data adalah budaya yang terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data yang ada. Budaya yang menghendaki keterukuran yang *fact-based* atau berdasarkan data dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkritisi setiap keputusan yang diambil.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar budaya literasi data dapat diterapkan dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni adanya dukungan ketersediaan data ketenagakerjaan yang berkualitas, yaitu akurat, relevan, up to date, lengkap, dan terpadu. Data ketenagakerjaan yang berkualitas menjadi sangat penting karena data sejatinya merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dari suatu kejadian.

Data dapat diolah menjadi informasi yang memberikan pengetahuan, dan jika disajikan secara periodik dan berkala maka akan didapatkan gambaran historis atau sejarah dari suatu fakta. Yang tentu saja akan sangat penting dan berguna untuk pengampilan kebijakan dan keputusan dalam membuat suatu perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan, serta melakukan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya dalam menyediakan data ketenagakerjaan yang lengkap dan disajikan secara periodik dan berkala, Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan menyusun dan menerbitkan Buku Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD).

B. Tujuan

Buku Ketenagakerjaan Dalam Data disusun dan disajikan dengan tujuan untuk:

- a. Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang relevan, komprehensif, berkualitas, dan terbaru (up to date) secara periodik dan berkala.
- b. Sumber referensi pengambilan kebijakan dan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.
- c. Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 tahun 2020 Tentang Satu Data Ketenagakerjaan, khususnya pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan "Penyajian Data dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun dan harus dalam bentuk sederhana agar mudah dimengerti.
- d. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pembangunan ketenagakerjaan.

C. Metodologi

C.1. Jenis Data

Secara garis besar, ada dua jenis data yang disajikan dalam buku KDD ini, yaitu:

- 1) Data Ketenagakerjaan Umum, adalah data ketenagakerjaan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan bersifat makro. Termasuk dalam data jenis ini yaitu: Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, dan Pengangguran Terbuka.
- 2) Data Ketenagakerjaan Khusus, adalah data ketenagakerjaan yang memiliki ciri-ciri sektoral dan bersifat mikro atau khusus dalam arti data tersebut dihasilkan dari proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan. Termasuk data dalam jenis ini yaitu data terkait substansi: Pelatihan vokasi dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

C.2. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

Sumber data ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua sesuai dengan jenis data ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Data Ketenagakerjaan umum bersumber dari data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas dilakukan dengan cara pencacahan terhadap sampel terpilih dan diselenggarakan oleh BPS dua kali dalam setahun, yakni periode Agustus dan Periode Agustus. Hasil Sakernas periode Agustus hanya dapat dilakukan estimasi sampai dengan level provinsi dan berita resminya dirilis pada bulan Mei. Sedangkan hasil Sakernas periode Agustus dapat dilakukan estimasi sampai dengan level kabupaten/kota dan berita resminya dirilis pada bulan November. Dalam buku KDD ini, yang digunakan adalah hasil Sakernas Februari 2023.
- 2) Data ketenagakerjaan khusus bersumber dari produsen data ketenagakerjaan, yaitu unit teknis Kementerian Ketenagakerjaan serta sumber lainnya seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), PMO Kartu Prakerja, maupun organisasi internasional terkait. Data ini dikumpulkan dengan cara kompilasi administrasi produk data – data ketenagakerjaan. Dalam buku KDD edisi ke tujuh ini, secara umum penyajian data dengan titik *cut off* bulan September Tahun 2023.

C.3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua tools. Yang pertama, data ketenagakerjaan umum atau data hasil Sakernas Februari 2023 diolah menggunakan paket program IBM SPSS Statistics. Sedangkan data ketenagakerjaan khusus yang berupa produk kompilasi administratif diolah dengan menggunakan paket program Microsoft Excel.

C.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Ini adalah metode statistik yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan maksud agar data menjadi lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna. Melalui metode ini, data ketenagakerjaan yang sudah terkumpul dideskripsikan atau dibuat gambaran umum tentang karakteristiknya. Ukuran-ukuran yang dapat disajikan dengan metode statistik deskriptif ini berupa frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, kecenderungan suatu gugus data, dan lain-lain. Agar lebih mudah dibaca dan dipahami, maka data diringkas dalam bentuk tabulasi dan/atau grafik/diagram.

C.5. Ukuran Presisi Estimasi

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, data ketenagakerjaan umum yang disajikan dalam buku KDD ini merupakan hasil suatu kegiatan survei, yaitu Sakernas. Dalam survei, pendataan atau pencacahan dilakukan terhadap sampel yang sebelumnya dipilih dengan menggunakan metode sampling tertentu. Hasil pencacahan terhadap sampling kemudian digunakan untuk melakukan estimasi terhadap angka populasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat presisi suatu estimasi relatif terhadap estimasinya. Dalam hal ini, ukuran yang digunakan adalah Relatif Standar Error (RSE). Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan. Menurut Aryago Mulia dkk (2008), keputusan keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari kondisi berikut:

- Nilai $RSE \leq 25\%$, hasil estimasi dianggap akurat dan bisa digunakan
- $25\% < \text{nilai } RSE \leq 50\%$, akurasi hasil estimasi tingkat sedang dan perlu kehati-hatian jika digunakan
- Nilai $RSE > 50\%$, hasil estimasi tidak akurat sehingga tidak layak digunakan. Dan harus digabungkan dengan estimasi lain untuk mendapatkan estimasi dengan nilai $RSE \leq 25\%$

D. Ruang Lingkup

Buku KDD ini merupakan salah satu bentuk penyediaan data ketenagakerjaan dengan format buku dan diterbitkan secara periodik dua kali setahun. Lingkup data yang disajikan mencakup:

- Data Ketenagakerjaan Umum
- Data Pelatihan dan Produktivitas
- Data Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Data Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Data Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

E. Definisi Operasional

a

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3)	: tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang K3 (Permenaker No.33 tahun 2016)
Anak	: setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Anak yang bekerja	: .anak-anak yang terlibat dalam aktivitas apa saja di dalam proses produksi, sesuai SSN, paling sedikit satu jam dalam periode referensi (Konsep ILO) .anak-anak umur 15-17 tahun yang masuk dalam kategori penduduk yang bekerja (Sakernas Agustus 2019)
Angkatan Kerja	: penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. (http://bps.go.id)
Arbiter	: seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Asosiasi Pengusaha	: organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk kepentingan pengusaha (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

B

- Badan** : Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)** : Badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
- Badan Pusat Statistik (BPS)** : Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan survei atau sensus
(<https://www.bps.go.id>)
- Bukan Angkatan Kerja (BAK)** : Penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya
(<https://www.bps.go.id>)
- Bekerja** : Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk
- Bursa Kerja Khusus** : kelompok penduduk yang bekerja
(<https://www.bps.go.id>)
Unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan Lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
(Permenaker No.39 Tahun 2016)

C

- Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)** : Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)

d

- Dinas Provinsi** : instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Dinas Kabupaten/Kota** : instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Data** : a. Informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
b. Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan,

- suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi
(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019)
- Data statistik** : Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis
(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019)
- e**
-
- f**
Fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh : fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh yang disediakan oleh perusahaan
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- g**
Golongan : uraian lebih lanjut dari golongan pokok data dan informasi ketenagakerjaan
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- Golongan Pokok** : tingkat pengelompokan yang paling luas dari golongan klasifikasi dari jenis data dan informasi ketenagakerjaan
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- h**
Hubungan Kerja : Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Hubungan Industrial** : suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
- Hakim Ad-Hoc** : Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
- i**
Instruktur : Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

luran : Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan (<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)

j

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan seminggu yang lalu : Jumlah kerja mereka yang bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Klasifikasi jumlah jam kerja seluruh pekerjaan seminggu yang lalu dibagi menjadi 0 (sementara tidak bekerja, 1-34 jam, 35 -40 jam (Jam kerja normative berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam per minggu), 41 – 48 jam, > 48 jam (ambang batas untuk mengklasifikasikan jam kerja berlebih menurut Konvensi ILO 1919 (No.1) dan 1930 (No.30)) (<https://www.bps.go.id>)

Jenis Pekerjaan/Jabatan : Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja (*Permenakertrans No.1 Tahun 2014*)

Jaminan Hari Tua (JHT) : manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap (<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)

Jaminan Kematian (JK) : manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) : Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (*Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional No. 1 Tahun 2016*)

Jaminan Pensiun (JP) : jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia

[\(<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>\)](https://bpjsketenagakerjaan.go.id)

Jaminan sosial : salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
[\(<https://bpjsketenagakerjaan.go.id>\)](https://bpjsketenagakerjaan.go.id)

k

Karakteristik Data Ketenagakerjaan : Ciri-ciri khusus yang melekat pada data ketenagakerjaan menurut substansinya

(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

Kartu Prakerja : Program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi

(<https://www.prakerja.go.id>)

Klasifikasi Data Ketenagakerjaan : pengelompokan data secara sistematis ke dalam golongan pokok, golongan, sub golongan dan kelompok berdasarkan substansi ketenagakerjaan sehingga terdefiniskan dengan jelas

Klaim : *(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)*
tuntutan pengakuan atas suatu fakta seseorang berhak atas sesuatu

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

(Permenaker No.33 tahun 2016)

Kompetensi kerja : kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

(Undang-undang No.13 Tahun 2003)

Kecelakaan Kerja : Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui

Kesejahteraan Buruh/Pegawai : suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman

	dan sehat (<i>Undang-undang No.13 Tahun 2003</i>)
Ketenagakerjaan	: Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Konsiliator	: Seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
■	
Lanjut Usia	: Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 1998</i>)
Lembaga Pelatihan Kerja	: Instansi pemerintah, badan, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja (<i>Permenaker No. 17 Tahun 2016</i>)
Lapangan Usaha	: bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
Lembaga Kerja Sama Bipartit	: forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Lembaga kerja sama tripartite	: Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	: (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>) Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri (<i>Permenaker No.39 Tahun 2016</i>)
Lembaga Penyalur Pekerja	

Rumah Tangga : Badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan pekerja rumah tangga

(Permenaker No.2 Tahun 2015)

m

Mogok Kerja : Tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan

(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

Mediator : pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

n

Notifikasi : Persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Ijas

(Permenaker No. 10 Tahun 2018)

o

-

p

Padat Karya : Kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga

Pekerja/Buruh : kerja, dan teknologi local dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat

Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

Pekerjaan Layak : Kondisi pekerjaan yang memenuhi aspirasi orang-orang dalam kehidupan kerja, termasuk mengenai peluang pekerjaan yang produktif, pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja,

perlindungan sosial bagi keluarga, prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, kebebasan untuk mengekspresikan keprihatinan, dan partisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta mengenai kesetaraan kesempatan dan perlakuan untuk semua wanita dan pria. (<https://www.ilo.org/global/topics/decentwork/lang—en/index.htm>)

Pekerja Migran Indonesia	: Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Undang-undang No. 18 Tahun 2017)
Pekerja Informal	: Pekerjaan diluar hubungan kerja
Pelatihan Kerja	: Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Pelatihan Tanggap Covid-19	: Program pelatihan yang diarahkan pada kegiatan untuk memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 seperti pelatihan memasak, pembuatan APD (hazmat), masker, pelindung muka (face shield), hand sanitizer, disinfektan, instalasi wastafel dan pelatihan lainnya. Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Pemuda	: mereka yang berusia 15 – 24 tahun (International Labour Organization)
Penduduk Usia Kerja	: Penduduk berumur 15 tahun ke atas (http://bps.go.id)
Penganggur Terbuka	: Mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja : (http://bps.go.id)
Pengantar Kerja	Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

	dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja (<i>PermenpanRB No. 5 Tahun 2014</i>)
Pengawasan Ketenagakerjaan	: Kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Penyandang Disabilitas	: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warge negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (<i>Undang – Undang No.8 Tahun 2016</i>)
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	: Pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Khusus	: Pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
Penindakan pelanggaran	: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam mengusut pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (<i>Permenakertrans No.1 Tahun 2014</i>)
Pengusaha	: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. (<i>Undang-undang No. 13 Tahun 2003</i>)
Penyandang Disabilitas	: Kesulitan/gangguan dalam melihat, mendengar, berjalan/naik tangga, menggunakan/menggerakkan jari/tangan, berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain, serta : kesulitan/gangguan lainnya

Perjanjian Kerja	(Kuesioner Survei Angkatan Kerja Nasional) Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak <i>(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)</i>
Perusahaan	: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. <i>(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)</i> Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia <i>(Peraturan BP2MI No.3 Tahun 2021)</i>
Pemagangan	: Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu <i>(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)</i>
Peraturan Perusahaan	: Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan <i>(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)</i>
Perjanjian kerja Bersama	: Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak <i>(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)</i>

Perselisihan hubungan industrial : Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

Pemutusan hubungan kerja : Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha
(Undang-undang No. 13 Tahun 2003)

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia : Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(Undang-undang No. 18 Tahun 2017)

Produktivitas : Rasio antara hasil atau luaran (output) dengan masukan yang dipakai (input)
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

Produktivitas Tenaga Kerja : rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi
(Permenakertrans No.1 Tahun 2014)

Q

-

R

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Remitansi : Rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk
(Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018)

Layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia kepada penerima di luar negeri maupun sebaliknya

S

Serikat pekerja/serikat : Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,

buruh	terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Sub golongan	: Uraian lebih lanjut dari golongan data dan informasi ketenagakerjaan (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Status pekerjaan	: Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan (http://bps.go.id)
Standardisasi Kompetensi Kerja	: Proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar kompetensi kerja (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	: rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenakertrans No.1 Tahun 2014)
t	
Tenaga kerja	: Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Tenaga kerja asing	: Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
Tenaga kerja berkeahlian	: Tiga negara yang tergabung dalam IMT-GT yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand menyepakati menggunakan asumsi yang didekati dari jenis pekerjaan untuk mengkatagorikan tenaga kerja berdasarkan skill yang dimiliki. Mereka yang bekerja sebagai : Manager, Profesional serta Teknisi dan Asisten Profesional
Tenaga Kerja Mandiri	: digolongkan sebagai Skilled Labor. Sementara itu, yang masuk ke dalam kategori <i>Semi-skilled</i> adalah mereka yang memiliki jenis

Tenaga Kerja Sukarela pekerjaan sebagai Tenaga Tata Usaha, Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan, Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pekerja Pengolahan, Kerajinan dan YBDI serta Operator dan Perakit Mesin. Untuk *Basic-skilled*, adalah mereka yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Pekerja Kasar.

Suatu program kegiatan pengembangan dan perluasan kerja yang dilakukan kepada masyarakat yang telah memiliki embrio usaha secara berkelompok

Tenaga kerja yang melakukan pendampingan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri terkait dengan perluasan kesempatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) : persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (<http://bps.go.id>)

Tenaga Kerja Pendamping : Tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian (*Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018*)

U

Upah : Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (*Undang-undang No. 13 Tahun 2003*)

V

-

W

Wajib lapor ketenagakerjaan : Laporan perusahaan secara tertulis setiap mengangkat, memindahkan menghentikan, menjalankan kembali tenaga kerja kepada pejabat yang ditunjuk (*Undang-undang No. 7 Tahun 1981*)

Y

-

Z

-

BAB II

DATA BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

1. Data Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan

Tabel 2.1.
Jumlah SKKNI yang ditetapkan menurut Lapangan Usaha dan Status
s.d Triwulan II Tahun 2023

LAPANGAN USAHA	STATUS SKKNI		TOTAL
	BERLAKU	DICABUT	
-1	-2	-3	-4
01. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	76	8	84
02. Pertambangan dan Penggalan	60	11	71
03. Industri Pengolahan	147	24	171
04. Pengadaan Listrik, Gas	16	7	23
05. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21	9	30
06. Konstruksi	135	9	144
07. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12	5	17
08. Transportasi dan Pergudangan	27	2	29
09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7	1	8
10. Informasi dan Komunikasi	44	14	58
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	25	10	35
12. Real Estat	1		1
13. Jasa Perusahaan	187	39	226
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7		7
15. Jasa Pendidikan	10	4	14
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21		21
17. Jasa Lainnya	97	21	118
Total	893	164	1,057

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

2. Data Program dan Materi Pelatihan

Tabel 2.2.
Jumlah Program dan Materi Pelatihan yang masih aktif menurut Kejuruan dan Metode Pelatihan
s.d Triwulan II Tahun 2023

KEJURUAN	METODE PELATIHAN			TOTAL
	BLENDED	OFFLINE	ONLINE	
-1	-2	-3	-4	-5
AGRIBISNIS	4	7	3	14
BABY SITTER	6	4		10
BANGUNAN	34	69	19	122
BISNIS DAN MANAJEMEN	111	88	199	398
CHILD CAREWORKER	2	1		3
DESAIN BATIK	1	13		14
ELDERLY CARETAKER	14	2	7	23
FAMILY COOK		1		1
FAMILY DRIVER	5	4		9
GARMEN APPAREL	39	107	8	154
HOUSEKEEPING	11	10	6	27
INDUSTRI KREATIF	6	52	13	71
METODOLOGI PELATIHAN	3	4	5	12
PARIWISATA	89	142	46	277
PENGEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT	1			1
PENGOLAHAN KULIT		1		1
PERIKANAN	11	10	16	37
PERTANIAN	31	51	1	83
PROCESSING	15	49	7	71
PRODUKTIVITAS	17	5	9	31
REFRIGERATION	18	27		45
TATA BOGA	8	7	10	25
TATA BUSANA	38	15	9	62
TATA KECANTIKAN	67	74	38	179
TEKNIK ELEKTRONIKA	33	41	3	77
TEKNIK LAS	48	91		139
TEKNIK LISTRIK	18	39	8	65
TEKNIK MANUFAKTUR	20	46	11	77
TEKNIK OTOMOTIF	37	92	49	178
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	179	177	392	748
Tidak Teridentifikasi	61	41	57	159
Total	927	1,270	916	3,113

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

3. Data Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Tabel 2.3.
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja menurut Provinsi dan Tipe Lembaga
s.d Triwulan II Tahun 2023

PROVINSI	TIPE LEMBAGA							TOTAL
	BLK KOMUNITAS	BLK UPTD	UPT BPVP	BLKLN	LEMBAGA PELATIHAN K/L	LPK SWASTA	SKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
ACEH	74	11	1			27		113
SUMATERA UTARA	93	11	1			94		199
SUMATERA BARAT	62	14	1			56		133
RIAU	37	8				11		56
JAMBI	59	7				23		89
SUMATERA SELATAN	70	12				36		118
BENGKULU	12	6				15		33
LAMPUNG	101	4				116		221
KEP. BANGKA BELITUNG	8	2	1			6		17
KEP. RIAU	2	2				31		35
DKI JAKARTA	7	2		3	1	81		94
JAWA BARAT	598	19	4	18		326		965
JAWA TENGAH	666	34	2	35	1	218	1	957
DI YOGYAKARTA	7	2		3	1	81		94
JAWA TIMUR	689	24	2	19	1	211		946
BANTEN	135	5	1			63		204
BALI	17	7				88		112
NUSA TENGGARA BARAT	78	9	1	1		93		182
NUSA TENGGARA TIMUR	42	6		2		26		76
KALIMANTAN BARAT	47	6				17		70
KALIMANTAN TENGAH	5	10				16		31
KALIMANTAN SELATAN	21	10				34		65
KALIMANTAN TIMUR	17	4	1			32		54
KALIMANTAN UTARA	12	2				5		19
SULAWESI UTARA	14	1				20		35
SULAWESI TENGAH	17	9				21		47
SULAWESI SELATAN	97	16	3		1	103		220
SULAWESI TENGGARA	10	5	2			25		42
GORONTALO	1	5				9		15
SULAWESI BARAT	29	2				12		43
MALUKU	3	3	1		1	13		21
MALUKU UTARA	7		1			8		16
PAPUA BARAT	5	1	1			1		8
PAPUA	5	4				8		17
Total	3,091	266	23	78	5	1,926	1	5,390

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Tabel 2.4.
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja menurut Provinsi dan Status Akreditasi
s.d Triwulan II Tahun 2023

PROVINSI	Status Akreditasi		TOTAL
	Terakreditasi	Belum Terakreditasi	
-1	-2	-3	-4
ACEH	15	98	113
SUMATERA UTARA	33	166	199
SUMATERA BARAT	41	92	133
RIAU	6	50	56
JAMBI	11	78	89
SUMATERA SELATAN	26	92	118
BENGKULU	2	31	33
LAMPUNG	46	175	221
KEP. BANGKA BELITUNG	3	14	17
KEP. RIAU	22	13	35
DKI JAKARTA	36	58	94
JAWA BARAT	200	765	965
JAWA TENGAH	162	795	957
DI YOGYAKARTA	36	101	137
JAWA TIMUR	107	839	946
BANTEN	43	161	204
BALI	57	55	112
NUSA TENGGARA BARAT	57	125	182
NUSA TENGGARA TIMUR	21	55	76
KALIMANTAN BARAT	11	59	70
KALIMANTAN TENGAH	12	19	31
KALIMANTAN SELATAN	15	50	65
KALIMANTAN TIMUR	23	31	54
KALIMANTAN UTARA	1	18	19
SULAWESI UTARA	6	29	35
SULAWESI TENGAH	9	38	47
SULAWESI SELATAN	67	153	220
SULAWESI TENGGARA	17	25	42
GORONTALO	2	13	15
SULAWESI BARAT	2	41	43
MALUKU	13	8	21
MALUKU UTARA	5	11	16
PAPUA BARAT	1	7	8
PAPUA	6	11	17
Total	1,114	4,276	5,390

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

4. Data Talent Corner di BLK UPTP

Tabel 2.5
Daftar UPT BPVP yang memiliki Talent Corner Tahun 2023

No.	Nama Lembaga	Alamat Lengkap
1	BPVP Surakarta	Jl. Bhayangkara No.38, Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57149
2	BPVP Samarinda	Jl. Untung Suropati No.43, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126
3	BPVP Kendari	Jl. D.I. Panjaitan no.226, kota kendari, provinsi sulawesi tenggara, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111
4	BPVP Padang	Jl. Sungai balang, bandar buat, lubuk kilangan, kota padang, provinsi sumatera barat, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Kota Padang, Sumatera Barat 25157
5	BBPVP Medan	Jl. Gatot subroto km 7,8 medan, sumatera utara, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Kota Medan, Sumatera Utara 20127
6	BBPVP Bekasi	Jalan Guntur Raya No.1, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Kota Bekasi, Jawa Barat 17144
7	BBPVP Makassar	Jalan Taman Makam Pahlawan No.4 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kota Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
8	BBPVP Serang	Jl. Raya pandeglang km. 3, karundang, kec. Cipocok jaya, kota serang - banten 42151 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Kota Serang, Banten 42125
9	BBPVP Bandung	Jl. Jenderal gatot subroto no. 170 kelurahan gumuruh kecamatan batununggal kota bandung Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal Kota Kota Bandung, Jawa Barat 40275
10	BBPVP Semarang	Jl. Brigjen sudiarto no.118, palebon, kec. Pedurungan, kota semarang, jawa tengah Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan Kota Kota Semarang, Jawa Tengah 50199
11	BPVP Banyuwangi	Jl. Ahmad Yani, Krajan, Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kota Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68472
12	BPVP Bandung Barat	Jl. Raya tangkuban parahu, cikole, lembang, kabupaten bandung barat, jawa barat Kelurahan Cibogo, Kecamatan Lembang Kota Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391
13	BPVP Sorong	Jl. Basuki rahmat km. 9,5 sorong - papua barat Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Malaimsimsa Kota Kota Sorong, Papua Barat 98419

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

5. Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri

Tabel 2.6.
Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri Menurut Provinsi dan Sumber Anggaran
Triwulan II Tahun 2023

PROVINSI	SUMBER ANGGARAN			
	DEKONSENTRASI	DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS (DPSP)	MANDIRI	APBN (DIT. BINA LAVOGAN)
-1	-2	-3	-4	-5
ACEH	29	-	8	
SUMATERA UTARA	157	90	21	
SUMATERA BARAT	182	-	82	
RIAU	54	-	5	
JAMBI	-	-	3	
SUMATERA SELATAN	176	-	6	
BENGKULU	143	-	4	
LAMPUNG	102	-	11	
KEP. BANGKA BELITUNG	27	-	4	
KEP. RIAU	72	-	5	
DKI JAKARTA	152	-	1,285	
JAWA BARAT	-	-	44	
JAWA TENGAH	151	-	130	
DI YOGYAKARTA	213	-	63	
JAWA TIMUR	197	-	76	
BANTEN	-	.	3	
BALI	194	-	4	
NUSA TENGGARA BARAT	238	-	6	
NUSA TENGGARA TIMUR	244	-	4	
KALIMANTAN BARAT	-	-	10	
KALIMANTAN TENGAH	-	-	5	
KALIMANTAN SELATAN	168	-	83	
KALIMANTAN TIMUR	200	-	19	
KALIMANTAN UTARA	137	-	-	
SULAWESI UTARA	161	-	38	
SULAWESI TENGAH	38	-	6	
SULAWESI SELATAN	-	-	17	
SULAWESI TENGGARA	174	-	4	
GORONTALO	114	-	-	
SULAWESI BARAT	4	-	-	
MALUKU	165	-	3	
MALUKU UTARA	164	-	-	
PAPUA BARAT	-	-	-	
PAPUA	10	-	4	
Total	3,666	90	1,953	-

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

6. Data Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri

Tabel 2.7.
Jumlah Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri Menurut Provinsi
s.d Triwulan II Tahun 2023

PROVINSI	Jumlah Penyelenggara
-1	-2
ACEH	174
SUMATERA UTARA	91
SUMATERA BARAT	171
RIAU	99
JAMBI	82
SUMATERA SELATAN	80
BENGKULU	152
LAMPUNG	129
KEP. BANGKA BELITUNG	41
KEP. RIAU	17
DKI JAKARTA	60
JAWA BARAT	149
JAWA TENGAH	102
DI YOGYAKARTA	116
JAWA TIMUR	107
BANTEN	35
BALI	294
NUSA TENGGARA BARAT	212
NUSA TENGGARA TIMUR	98
KALIMANTAN BARAT	157
KALIMANTAN TENGAH	169
KALIMANTAN SELATAN	97
KALIMANTAN TIMUR	306
KALIMANTAN UTARA	70
SULAWESI UTARA	52
SULAWESI TENGAH	160
SULAWESI SELATAN	123
SULAWESI TENGGARA	117
GORONTALO	61
SULAWESI BARAT	59
MALUKU	82
MALUKU UTARA	46
PAPUA BARAT	55
PAPUA	72
TIDAK TERIDENTIFIKASI	50
Total	3,885

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023)
– diolah Pusdatik Kemnaker

7. Data Peserta Pemagangan Luar Negeri

Tabel 2.8.
Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri Menurut Tipe Penyelenggara
Triwulan II Tahun 2023

BULAN	TIPE PENYELENGGARA		JUMLAH
	IM	SO	
-1	-2	-3	-4
Januari	165	232	397
Februari	197	74	271
Maret	246	-	246
April	178	238	416
Mei	236	116	352
Juni	-	551	551
Juli			-
Agustus			-
September			-
Oktober			-
November			-
Desember			-
Total	1,022	1,211	2,233

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

IM adalah singkatan dari International Manpower

SO adalah singkatan dari Sending Organization

Tabel 2.9.
Jumlah Peserta Pemagangan Luar Negeri Menurut Tipe Penyelenggara dan Jenis Kelamin
Triwulan II Tahun 2023

TIPE PENYELENGGARA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
-1	-2	-3	-4
IM JAPAN	992	30	1,022
LPK/SO	977	234	1,211
Total	1,969	264	2,233

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan:

IM adalah singkatan dari International Manpower

SO adalah singkatan dari Sending Organization

8. Data Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri

Tabel 2.10.
Jumlah *Sending Organization* Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Menurut Provinsi Tahun 2023

PROVINSI	Jumlah Penyelenggara
-1	-2
SUMATERA UTARA	4
SUMATERA BARAT	8
LAMPUNG	8
DKI JAKARTA	23
JAWA BARAT	146
JAWA TENGAH	49
DI YOGYAKARTA	12
JAWA TIMUR	29
BANTEN	20
BALI	37
NUSA TENGGARA BARAT	10
KALIMANTAN BARAT	1
SULAWESI UTARA	8
SULAWESI SELATAN	3
SULAWESI TENGGARA	2
GORONTALO	1
Total	361

Sumber :Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

9. Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Tabel 2.11.
Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menurut Provinsi dan Tipe Lembaga
Semester I Tahun 2023

PROVINSI	TIPE LEMBAGA						JUMLAH
	BLK KOMUNITAS	BLK UPTD	UPT BPVP	BLKLN	LPK SWASTA	SKPD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
ACEH	112	574	576		16		1,278
SUMATERA UTARA		589	1,251				1,840
SUMATERA BARAT	49	1,608	536				2,193
RIAU		305					305
JAMBI	108	735					843
SUMATERA SELATAN	191	1,663					1,854
BENGKULU	16	282					298
LAMPUNG	437	745					1,182
KEP. BANGKA BELITUNG		48	336				384
KEPULAUAN RIAU		317					317
DKI JAKARTA	11						11
JAWA BARAT	286	1,710	2,991	32	96		5,115
JAWA TENGAH	1,080	4,771	1,815	32			7,698
DI YOGYAKARTA	64	816					880
JAWA TIMUR	1,383	3,150	1,032		111	64	5,740
BANTEN	378	266	720				1,364
BALI	96	1,042					1,138
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	399	1,455	1,151		16		3,021
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	176	140	94		64		474
KALIMANTAN BARAT	175	470					645
KALIMANTAN TENGAH		544					544
KALIMANTAN SELATAN		431					431
KALIMANTAN TIMUR		464	674				1,138
KALIMANTAN UTARA		160					160
SULAWESI UTARA	31	80					111
SULAWESI TENGAH		451					451
SULAWESI SELATAN	128	518	1,264				1,910
SULAWESI TENGGARA		279	480				759
GORONTALO		301					301
SULAWESI BARAT		64					64
MALUKU		48	556				604
MALUKU UTARA			525				525
PAPUA BARAT			441				441
PAPUA		11					11
Tidak Teridentifikasi					82		82
Total	5,120	24,037	14,442	64	385	64	44,112

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

Tabel 2.12.
Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Semester I Tahun 2023

PROVINSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
-1	-2	-3	-4
ACEH	674	604	1,278
SUMATERA UTARA	771	1,069	1,840
SUMATERA BARAT	1,136	1,057	2,193
RIAU	142	163	305
JAMBI	361	482	843
SUMATERA SELATAN	878	976	1,854
BENGKULU	123	175	298
LAMPUNG	575	607	1,182
KEP. BANGKA BELITUNG	274	110	384
KEPULAUAN RIAU	223	94	317
DKI JAKARTA	10	1	11
JAWA BARAT	3,190	1,925	5,115
JAWA TENGAH	3,441	4,257	7,698
DI YOGYAKARTA	451	429	880
JAWA TIMUR	2,990	2,750	5,740
BANTEN	1,016	348	1,364
BALI	444	694	1,138
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	1,559	1,462	3,021
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	204	270	474
KALIMANTAN BARAT	308	337	645
KALIMANTAN TENGAH	239	305	544
KALIMANTAN SELATAN	182	249	431
KALIMANTAN TIMUR	780	358	1,138
KALIMANTAN UTARA	88	72	160
SULAWESI UTARA	41	70	111
SULAWESI TENGAH	246	205	451
SULAWESI SELATAN	871	1,039	1,910
SULAWESI TENGGARA	364	395	759
GORONTALO	134	167	301
SULAWESI BARAT	34	30	64
MALUKU	355	249	604
MALUKU UTARA	305	220	525
PAPUA BARAT	246	195	441
PAPUA	11		11
Tidak Teridentifikasi			82
Total	22,666	21,364	44,112

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

10. Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas

Tabel 2.13
Jumlah Peserta Peningkatan Produktivitas (P3) berdasarkan Provinsi dan
Jenis Kelamin Tahun 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Aceh	28	97	125
Bali	20	5	25
Banten	39	114	153
Bengkulu	9	16	25
D.I Yogyakarta	22	29	51
Dki Jakarta	11	6	17
Jambi	13	13	26
Jawa Barat	176	349	525
Jawa Tengah	188	217	405
Jawa Timur	82	223	305
Kalimantan Barat	1	24	25
Kalimantan Selatan	23	27	50
Kalimantan Timur	15	110	125
Kep. Bangka Belitung	17	33	50
Lampung	0	1	1
Maluku	8	92	100
Nusa Tenggara Barat	14	61	75
Nusa Tenggara Timur	14	36	50
Papua Barat	11	189	200
Sulawesi Selatan	92	233	325
Sulawesi Tengah	3	22	25
Sulawesi Tenggara	16	59	75
Sumatera Barat	30	21	51
Sumatera Utara	31	60	91
Maluku Utara	37	63	100
Total	900	2.100	3.000

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

11. Data Tenaga Kerja Yang Meningkatkan Produktivitasnya

Tabel 2.14
Jumlah Tenaga Kerja Yang Meningkatkan Produktivitasnya Tahun 2023

A. Data Pengukuran Tenaga Kerja			
No.	Intervensi	Jumlah Tenaga Kerja	
1	Pelatihan PBK	44.112	
2	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	3.000	
3	Website Kita Produktif	0	
Jumlah (A)		47.112	

B. Data Pengukuran Perusahaan Konversi Tenaga Kerja			
No.	Intervensi	Jumlah Tenaga Kerja	
1	Pengukuran UPTP	0	
2	Perusahaan	0	
3	Website Kita Produktif	0	
4	Siddhakarya	0	
Jumlah (B)		0	
C. Total data Pengukuran Produktivitas (A + B)		47.112	

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

12. Data Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 2.15
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020 s.d. 2022

Lapangan Usaha	Produk Domestik Bruto			Penduduk Yang Bekerja			Produktivitas (Juta Rp/Tk)		
	2020	2021*	2022**	2020	2021	2022	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,378,399	1,404,191	1,435,853	38,224,371	37,130,676	38,703,996	36	38	37
B. Pertambangan dan Penggalian	790,475	822,100	858,147	1,352,236	1,443,422	1,530,157	585	570	561
C. Industri Pengolahan	2,209,920	2,284,822	2,396,603	17,482,849	18,694,463	19,172,397	126	122	125
D. Pengadaan Listrik dan Gas	108,826	114,861	122,452	303,551	284,518	311,124	359	404	394
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,449	9,919	10,240	490,984	562,726	511,150	19	18	20
F. Konstruksi	1,072,335	1,102,518	1,124,725	8,066,497	8,293,769	8,481,349	133	133	133
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,385,651	1,449,831	1,529,886	24,702,695	25,736,110	26,193,890	56	56	58
H. Transportasi dan Pergudangan	393,419	406,169	486,875	5,591,941	5,443,654	5,805,308	70	75	84
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299,122	310,749	347,944	8,543,794	9,180,340	9,607,709	35	34	36
J. Informasi dan Komunikasi	652,063	696,506	750,389	933,273	998,199	1,009,091	699	698	744
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	457,487	464,638	473,615	1,557,927	1,597,805	1,626,460	294	291	291
L. Real Estate	324,259	333,283	339,015	393,665	355,955	450,007	824	936	753
M,N. Jasa Perusahaan	195,671	197,107	214,399	1,796,755	2,017,071	2,237,712	109	98	96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365,446	364,251	373,439	4,569,946	4,848,980	4,875,999	80	75	77
P. Jasa Pendidikan	350,273	350,663	352,716	6,028,610	6,491,628	6,512,249	58	54	54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,227	157,085	161,385	2,005,522	2,197,328	2,234,153	71	71	72
R,S,T,U. Jasa lainnya	196,609	200,773	219,778	6,409,568	5,773,879	6,033,962	31	35	36
Total	10,722,999	11,120,078	11,710,398	128,454,184	131,050,523	135,296,713	83	85	87

Sumber: BPS. Sakernas Agustus 2015 - 2022, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: Publikasi PDB 21 Februari 2023 (bps.go.id)

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

13. Data Instruktur

Tabel 2.16
Jumlah Instruktur menurut Provinsi dan Kategori Instruktur Tahun 2023

Provinsi	Instruktur Pemerintah	Instruktur Swasta	Jumlah
Aceh	89	174	263
Bali	63	228	291
Banten	108	270	378
Bengkulu	53	69	122
D.I. Yogyakarta	103	117	220
D.K.I. Jakarta	177	312	489
Gorontalo	31	15	46
Jambi	38	83	121
Jawa Barat	441	1.317	1.758
Jawa Tengah	612	689	1.301
Jawa Timur	311	975	1.286
Kalimantan Barat	35	47	82
Kalimantan Selatan	81	136	217
Kalimantan Tengah	32	58	90
Kalimantan Timur	59	116	175
Kalimantan Utara	17	12	29
Kepulauan Bangka Belitung	37	47	84
Kepulauan Riau	11	34	45
Lampung	54	203	257
Maluku	52	30	82
Maluku Utara	46	8	54
Nusa Tenggara Barat	81	239	320
Nusa Tenggara Timur	23	49	72
Papua	41	37	78
Papua Barat	40	10	50
Riau	17	261	278
Sulawesi Barat	12	9	21
Sulawesi Selatan	218	186	404
Sulawesi Tengah	33	53	86
Sulawesi Tenggara	66	65	131
Sulawesi Utara	7	49	56
Sumatera Barat	129	148	277
Sumatera Selatan	75	217	292
Sumatera Utara	95	348	443
Undefined	2	5	7
Total	3.289	6.616	9.905

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

14. Data Tenaga Pelatihan

Tabel 2.17
Jumlah Tenaga Pelatihan menurut Provinsi dan Kategori Tenaga Pelatihan
Tahun 2023

Provinsi	Tenaga Pelatihan Pemerintah	Tenaga Pelatihan Swasta	Jumlah
Aceh	47	94	141
Bali	37	44	81
Banten	87	67	154
Bengkulu	30	39	69
D.I. Yogyakarta	30	38	68
D.K.I. Jakarta	106	104	210
Gorontalo	13	7	20
Jambi	24	55	79
Jawa Barat	135	479	614
Jawa Tengah	223	284	507
Jawa Timur	256	343	599
Kalimantan Barat	11	23	34
Kalimantan Selatan	35	66	101
Kalimantan Tengah	23	16	39
Kalimantan Timur	50	85	135
Kalimantan Utara	7	7	14
Kepulauan Bangka Belitung	17	30	47
Kepulauan Riau	8	6	14
Lampung	62	88	150
Maluku	15	11	26
Maluku Utara	14	16	30
Nusa Tenggara Barat	49	112	161
Nusa Tenggara Timur	16	20	36
Papua	12	9	21
Papua Barat	18	13	31
Riau	18	75	93
Sulawesi Barat	4	14	18
Sulawesi Selatan	74	183	257
Sulawesi Tengah	21	16	37
Sulawesi Tenggara	67	14	81
Sulawesi Utara	1	7	8
Sumatera Barat	70	81	151
Sumatera Selatan	35	51	86
Sumatera Utara	60	118	178
Undefined	-	3	3
Total	1.675	2.618	4.293

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusatdik Kemnaker

15. Data Tenaga Kerja Tersertifikasi

Tabel 2.18
Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi pada tahun 2023

Provinsi	Total
Aceh	4.784
Bali	29.079
Banten	23.254
Bengkulu	2.422
Daerah Istimewa Yogyakarta	14.759
DKI Jakarta	62.527
Gorontalo	1.044
Jambi	3.104
Jawa Barat	123.358
Jawa Tengah	128.551
Jawa Timur	104.429
Kalimantan Barat	5.650
Kalimantan Selatan	7.974
Kalimantan Tengah	3.807
Kalimantan Timur	19.511
Kalimantan Utara	1.052
Kepulauan Bangka Belitung	1.348
Kepulauan Riau	7.673
Lampung	11.919
Maluku	2.159
Maluku Utara	1.359
Nusa Tenggara Barat	13.095
Nusa Tenggara Timur	6.659
Papua	1.498
Papua Barat	1.911
Riau	14.657
Sulawesi Barat	1.296
Sulawesi Selatan	9.149
Sulawesi Tengah	1.509
Sulawesi Tenggara	2.603
Sulawesi Utara	1.721
Sumatera Barat	10.737
Sumatera Selatan	14.073
Sumatera Utara	17.560
Luar Negeri	12
Total	656.243

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023)

– diolah Pusdatik Kemnaker

16. Data LSP Terlisensi

Tabel 2.19
Jumlah LSP Terlisensi menurut Provinsi dan Jenis LSP Tahun 2023

Provinsi	LSP P1	LSP P2	LSP P3	Total
Aceh	35	1	-	36
Bali	46	-	15	61
Banten	38	4	20	62
Bengkulu	4	-	-	4
Daerah Istimewa Yogyakarta	61	3	12	76
DKI Jakarta	157	43	196	396
Gorontalo	4	-	-	4
Jambi	8	-	-	8
Jawa Barat	255	22	79	356
Jawa Tengah	304	8	17	329
Jawa Timur	303	14	47	364
Kalimantan Barat	11	-	1	12
Kalimantan Selatan	24	-	-	24
Kalimantan Tengah	9	-	2	11
Kalimantan Timur	22	4	2	28
Kalimantan Utara	3	-	-	3
Kepulauan Bangka Belitung	7	-	-	7
Kepulauan Riau	15	-	4	19
Lampung	35	-	2	37
Maluku	4	1	-	5
Maluku Utara	1	1	1	3
Nusa Tenggara Barat	15	2	2	19
Nusa Tenggara Timur	9	-	1	10
Papua	7	-	-	7
Papua Barat	4	2	-	6
Riau	32	-	3	35
Sulawesi Barat	13	-	-	13
Sulawesi Selatan	33	2	6	41
Sulawesi Tengah	6	-	-	6
Sulawesi Tenggara	-	1	-	1
Sulawesi Utara	8	-	1	9
Sumatera Barat	64	2	1	67
Sumatera Selatan	50	-	2	52
Sumatera Utara	32	1	4	37
Total	1.619	111	418	2.148

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas (data per Triwulan II Tahun 2023) – diolah Pusdatik Kemnaker

BAB III

**DATA BIDANG PENEMPATAN
DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA**

3.1 Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK)

3. 1. 1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar melalui Bursa Kerja Khusus Berdasarkan Wilayah dan Jenis Penempatan Periode s/d Triwulan II Tahun 2023

Wilayah Penempatan	Triwulan I					Triwulan II*				
	Penempatan				Grand Total	Penempatan				Grand Total
	AKAD	AKAN	AKL	Tidak ada keterangan*		AKAD	AKAN	AKL	Tidak ada keterangan*	
Banten	4				4	6				6
D.I.Yogyakarta			1		1	3		2		5
DKI Jakarta	47				47	78				78
Jawa Barat	79		15		94	102		16		118
Jawa Tengah			215		215	3		413		416
Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta								8		8
Jepang							8			8
Kalimantan	3				3	3				3
Malaysia		20			20		22			22
Sumatera Barat	1				1	1				1
Lainnya**									112	112
Grand Total	134	20	231		385	196	30	439	112	777

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: *data Penempatan oleh BKK Triwulan II berasal dari Kab. Banyumas dan Kab.Cilacap

3. 1. 2. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar melalui Bursa Kerja Khusus Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin Periode s/d Triwulan II Tahun 2023

Wilayah Penempatan	Triwulan I			Triwulan II*		
	Jenis Kelamin		Grand Total	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Banten	2	2	4	3	3	6
D.I.Yogyakarta	1		1	4	1	5
DKI Jakarta	45	2	47	70	8	78
Jawa Barat	80	14	94	103	15	118
Jawa Tengah	92	123	215	135	281	416
Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta				8		8
Jepang				8		8
Kalimantan	3		3	3		3
Malaysia		20	20		22	22
Sumatera Barat	1		1	1		1
Lainnya**				74	38	112
Grand Total	224	161	385	409	368	777

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: *data Penempatan oleh BKK Triwulan II berasal dari Kab. Banyumas dan Kab.Cilacap

3.2 Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

3. 2. 1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Periode s/d Triwulan II Tahun 2023

Pendidikan Terakhir	Triwulan I			Triwulan II		
	Jenis Kelamin		Grand Total	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Sekolah Dasar/ sederajat	46		46		1	1
SMP/ sederajat	37		37	1	1	2
SMA/SMK/ sederajat	171	62	233	198	88	286
Diploma I/II/III		1	1	15	2	17
Universitas	2	1	3	17	6	23
Lainnya*	6	2	8			
Grand Total	262	66	328	231	98	329

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: *tidak terisi lengkap

3.3 Data Tenaga Kerja Disabilitas yang Ditempatkan

3. 3. 1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Periode s/d Triwulan II Tahun 2023

No	Ragam Disabilitas	Triwulan I			Triwulan II		
		Jenis Kelamin		Grand Total	Jenis Kelamin		Grand Total
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	Penyandang Disabilitas Fisik	62	32	94	98	52	150
2	Penyandang Disabilitas Ganda	2	2	4	3	2	5
3	Penyandang Disabilitas Mental	3	1	4	3	1	4
4	Penyandang Disabilitas Sensorik	43	18	61	76	37	113
5	Lainnya	2	2	4	2	3	5
Grand Total		112	55	167	182	95	277

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 3. 3. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi dan Ragam Disabilitas Periode s/d Triwulan II Tahun 2023

Pendidikan	Triwulan I			Triwulan II		
	Jenis Kelamin		Grand Total	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
SD ke bawah	16	3	19	16	3	19
SMP sederajat	3	9	12	3	9	12
SMA/SMK sederajat	68	34	102	68	34	102
Diploma I/II/III/Akademi	2	2	4	2	2	4
Diploma IV/Strata 1/Strata 2	7	4	11	13	4	17
Lainnya	16	3	19	80	43	123
Grand Total	112	55	167	182	95	277

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.4 Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)

3. 4. 1. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Berdasarkan Provinsi Penempatan dan Jenis Kelamin Periode s/d Triwulan II Tahun 2023

Provinsi	Triwulan I			Triwulan II		
	Jenis Kelamin		Grand Total	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Aceh					1	1
Bali		7	7		4	4
Banten		176	176	2	182	184
Bengkulu		3	3		2	2
DKI Jakarta	5	548	553	6	624	630
Gorontalo					1	1
Jambi		57	57		57	57
Jawa Barat		120	120		109	109
Jawa Tengah		58	58		41	41
Jawa Timur		2	2		12	12
Kalimantan Barat					3	3
Kalimantan Selatan		6	6		5	5
Kalimantan Tengah		1	1			
Kalimantan Timur		6	6		2	2
Kepulauan Bangka Belitung		1	1		1	1
Kepulauan Riau	27	290	317	45	361	406
Lainnya*		11	11		11	11
Lampung		1	1			
Maluku Utara					1	1
Nusa Tenggara Timur		3	3		1	1
Papua					2	2
Papua Barat					1	1
Riau		35	35		25	25
Sulawesi Selatan		127	127		185	185
Sulawesi Tengah		2	2			
Sulawesi Utara		7	7		6	6
Sumatera Barat		4	4		9	9
Sumatera Selatan		20	20		22	22
Sumatera Utara		211	211	12	194	206
Grand Total	32	1.696	1.728	65	1.862	1.927

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: *Alamat tidak terisi lengkap

3.5 Data PMI yang Ditempatkan

3.5.1. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Skema Penempatan, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Bulan September Tahun 2023

Skema Penempatan	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
G TO G	8.647	623	9.270				9.270
P TO P	56.910	17.050	73.960	209	97.411	97.620	171.580
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA	832	381	1.213	255	458	713	1.926
PERSEORANGAN (MANDIRI)	2.233	1.085	3.318	1		1	3.319
PMI PERPANJANGAN PK	795	440	1.235	20	383	403	1.638
PMI PERPANJANGAN PK LN	5.200	11.585	16.785				16.785
PMI PERSEORANGAN	6.929	4.194	11.123				11.123
UKPS	138		138				138
Grand Total	81.684	35.358	117.042	485	98.252	98.737	215.779

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2023

3.5.2. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Negara Penempatan, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Bulan September Tahun 2023

Negara Penempatan	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
ALBANIA	3	5	8				8
AMERIKA SERIKAT	3	1	4				4
ARAB SAUDI	2.943	1.142	4.085	23	93	116	4.201
ARMENIA		5	5				5
AZERBAIJAN		6	6				6
BAHAMA	65		65				65
BAHRAIN	16	18	34				34
BELANDA	1	4	5				5
BELARUS		8	8				8
BOSNIA HERZEGOVINA	2	6	8				8
BRUNEI DARUSSALAM	1.286	181	1.467	35	146	181	1.648
BULGARIA	114	52	166				166
CANADA	3	1	4				4
CINA	3	7	10				10
CZECH	12	1	13				13
D O M I N I C A	4		4				4
ERITREA	1		1				1
FIJI	3		3				3
G U I N E A	1	1	2				2
G U Y A N A	23	2	25				25
GABON	22	3	25				25
H A I T I		1	1				1
HONGKONG	6	73	79	161	57.126	57.287	57.366
HUNGARIA	311	55	366				366
I R A K	2		2				2
INDIA	14		14				14
INGGRIS	25	9	34				34
ITALIA	2.122	269	2.391				2.391
JEPANG	5.025	2.251	7.276	1		1	7.277
JERMAN	21	45	66				66
K O N G O	5	3	8				8
KAMBOJA	23		23	1		1	24
KAZAKSTAN		5	5				5
KEPULAUAN COOK	41	15	56				56

Negara Penempatan	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
KOREA SELATAN	9.458	315	9.773				9.773
KROASIA	16	8	24				24
KUWAIT	192	122	314				314
KYRGYZSTAN		2	2				2
LIBANON		5	5				5
LITHUANIA		3	3				3
M A L T A		1	1				1
MACAO	13	13	26				26
MALADEWA	211	319	530		1	1	531
MALAGASI		1	1				1
MALAYSIA	38.765	13.741	52.506	238	5.002	5.240	57.746
MAROKO		4	4				4
MAURITIUS		2	2				2
MEKSIKO		17	17				17
MESIR	1	8	9				9
MOLDOVA		2	2				2
NIGERIA	1	7	8				8
OMAN	31	25	56	1	24	25	81
PAKISTAN		3	3				3
PAPUA NUGINI	454	47	501	1		1	502
PERANCIS	36	3	39				39
POLANDIA	753	401	1.154	1	3	4	1.158
PULAU SOLOMON	323	8	331				331
QATAR	104	89	193		11	11	204
RUMANIA	94	103	197				197
RUSIA	1	245	246				246
SELANDIA BARU	101	35	136				136
SEYCHELLES	12	4	16				16
SINGAPURA	3	103	106	1	5.054	5.055	5.161
SIPRUS	1	81	82				82
SLOVAKIA	282	23	305				305
SRILANKA	17	78	95				95
SURINAME	37		37				37
SWAZILAND	1		1				1
TAIWAN	17.930	13.461	31.391	22	30.774	30.796	62.187
TAJIKISTAN		2	2				2
THAILAND	8	1	9				9
TURKI	398	1.621	2.019		1	1	2.020
UNI EMIRAT ARAB	204	242	446		16	16	462
UZBEKISTAN		24	24				24
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	1	1	2				2
YORDANIA	17	18	35		1	1	36
YUNANI	1	1	2				2
ZAMBIA	118		118				118
Grand Total	81.684	35.358	117.042	485	98.252	98.737	215.779

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2023

3. 5. 3. Jumlah Penempatan PMI Berdasarkan Provinsi Asal, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Bulan September Tahun 2023

Provinsi Asal	FORMAL		Total	INFORMAL		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
ACEH	544	239	783	3	39	42	825
BALI	3.669	3.532	7.201	1	32	33	7.234
BANGKA BELITUNG	10	6	16		9	9	25
BANTEN	839	471	1.310	3	1.067	1.070	2.380
BENGKULU	137	84	221		136	136	357
DI YOGYAKARTA	464	363	827	1	213	214	1.041
DKI JAKARTA	345	276	621	6	450	456	1.077
GORONTALO	4	9	13		2	2	15
J A M B I	124	62	186		50	50	236
JAWA BARAT	9.036	5.924	14.960	27	24.810	24.837	39.797
JAWA TENGAH	15.595	7.246	22.841	48	23.434	23.482	46.323
JAWA TIMUR	15.509	5.969	21.478	145	32.760	32.905	54.383
KALIMANTAN BARAT	447	176	623	3	45	48	671
KALIMANTAN SELATAN	32	45	77		53	53	130
KALIMANTAN TENGAH	20	16	36		16	16	52
KALIMANTAN TIMUR	60	10	70	1	24	25	95
KALIMANTAN UTARA	176	51	227	5	21	26	253
KEPULAUAN RIAU	610	81	691		29	29	720
LAMPUNG	4.785	2.214	6.999	6	9.200	9.206	16.205
MALUKU	11	17	28		9	9	37
MALUKU UTARA	2	6	8				8
NUSA TENGGARA BARAT	24.617	703	25.320	14	3.360	3.374	28.694
NUSA TENGGARA TIMUR	255	128	383	50	1.097	1.147	1.530
PAPUA	29	8	37		2	2	39
PAPUA BARAT	5	1	6		3	3	9
R I A U	61	99	160		5	5	165
RIAU	92	90	182	1	20	21	203
SULAWESI BARAT	84	37	121	15	32	47	168
SULAWESI SELATAN	937	587	1.524	141	194	335	1.859
SULAWESI TENGAH	44	77	121	1	90	91	212
SULAWESI TENGGARA	102	36	138	12	80	92	230
SULAWESI UTARA	114	45	159	1	271	272	431
SUMATERA BARAT	436	385	821		7	7	828
SUMATERA SELATAN	488	575	1.063		564	564	1.627
SUMATERA UTARA	2.001	5.790	7.791	1	128	129	7.920
Grand Total	81.684	35.358	117.042	485	98.252	98.737	215.779

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2023

3.6 Data Perusahaan Penempatan PMI

3. 6. 1. Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Periode Januari – Agustus Tahun 2023

No	Provinsi	Bulan							
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Bali	9	9	9	10	10	10	10	10
2	Banten	14	14	14	14	14	14	14	14
3	D.I.Yogyakarta	2	2	2	3	3	3	3	3
4	DKI Jakarta	109	110	111	111	112	114	114	114
5	Jawa Barat	102	102	103	103	103	103	103	103
6	Jawa Tengah	26	26	26	27	27	28	28	28
7	Jawa Timur	62	62	63	63	64	67	67	70

8	Kalimantan Barat	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Kalimantan Utara	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Kepulauan Riau	2	3	3	3	3	3	3	4
11	Lampung	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Nusa Tenggara Barat	12	12	12	12	12	13	13	13
13	Nusa Tenggara Timur	2	2	2	2	2	1	1	1
14	Sumatera Barat	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Sumatera Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Sumatera Utara	7	7	7	7	8	8	8	8
Grand Total		355	357	360	363	366	372	372	376

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.7 Data Lowongan Kerja di Luar Negeri

3.7.1. Jumlah Job Order Berdasarkan Negara dan Jenis Kelamin Periode Januari – September Tahun 2023

Negara	Jenis Kelamin			Jumlah
	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki/ Perempuan*	
Arab Saudi	639	3.511	-	4.150
Brunei Darussalam	170	15	209	394
Cina, Wilayah Administratif Khusus Hong Kong	2.266	62.040	60.619	124.725
Cina, Wilayah Administratif Khusus Makao	-	-	100	100
Jepang	-	-	110	110
Korea Selatan	1.860	-	2.309	4.169
Kuwait	75	25	227	327
Malaysia	52.698	75.297	-	127.995
Polandia	170	30	1.810	2.010
Selandia Baru	281	67	24	372
Singapura	-	36.090	900	36.990
Slovakia	50	-	755	805
Taiwan	213.673	544.430	6	758.109
Turki	-	50	4.860	4.910
Uni Emirat Arab	95	855	66	1.016
Yordania	-	-	7	7
Grand Total	271.977	722.410	72.002	1.066.189

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2023

3.8 Data PMI yang Mendapat Layanan Perlindungan di Negara Penempatan

3.8.1. Jumlah PMI yang Mendapat Layanan Perlindungan di Negara Penempatan Tahun 2022

No	Negara	Bulan		
		Mei	Juni	Juli
1	Arab Saudi	479	225	441
2	Singapura	1.215	1255	1984
3	Yordania	6	14	11
4	Uni Emirat Arab	12		572
5	Qatar	135	10	7
6	Taiwan	30	40	38
7	Malaysia	16	18	10
Total		1.893	1.562	3.063

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.9 Data Permasalahan PMI di Luar Negeri

3.9.1. Jumlah Pengaduan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan dan Jenis Kelamin Januari – September 2023

Negara	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-Laki	Perempuan	
ALBANIA	1		1
AUSTRALIA	12		12
BAHRAIN	1	6	7
BRAZIL	1		1
BRUNEI DARUSSALAM	5	6	11
CAMBODIA	23	8	31
CANADA	4		4
CHINA	4	2	6
FIJI ISLANDS	3		3
GABON	1		1
GERMANY		1	1
GUYANA	1		1
HONG KONG	3	155	158
IRAQ	2	20	22
ITALY	1		1
JAPAN	7	2	9
KOREA SELATAN	39	4	43
KUWAIT	1		1
Lainnya	1	2	3
LAOS	5	2	7
LIBERIA	1		1
LIBYA		3	3
MALAYSIA	78	187	265
MESIR		3	3
MOZAMBIQUE	1		1
MYANMAR	42	8	50
NEW ZEALAND	1		1
OMAN		3	3
PAPUA NEW GUINEA	1		1

Negara	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-Laki	Perempuan	
PERU	3		3
PHILIPPINES	5	1	6
POLAND	31	3	34
PORTUGAL	2		2
QATAR		4	4
ROMANIA	1		1
SAUDI ARABIA	36	373	409
SERBIA AND MONTENEGRO	2		2
SINGAPORE	7	29	36
SLOVAKIA	5		5
SOLOMON ISLANDS	2		2
SOUTH AFRICA	1		1
SYRIA		9	9
TAIWAN	232	40	272
THAILAND	2	1	3
TURKEY		4	4
UNITED ARAB EMIRATES	5	31	36
UNITED KINGDOM	26	3	29
UNITED STATES	1		1
YORDANIA		2	2
Grand Total	600	912	1512

Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker, Data ditarik pada 1 Oktober 2023

3.10 Data MoU Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

3. 10. 1. Jumlah MoU Indonesia Berdasarkan Negara dan Status Perjanjian Tahun 2022

No	Negara	Status Perjanjian				Jumlah
		Berlaku	Proses Perundingan Pembaruan	Proses Perundingan Penyusunan	Tidak Berlaku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Arab Saudi		1			1
2	Malaysia	2			1	3
3	Jepang	2				2
4	Korea	2				2
5	Brunei Darussalam			1		1
6	Taiwan	1				1
7	Australia			1		1
8	Jerman	1				1
9	Kuwait	1				1
10	United Emirates Arab		1	1		2
11	Swiss	1				1
Jumlah		10	2	3	1	16

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.11 Data Tenaga Kerja Peserta Program Padat Karya

3. 11. 1. Jumlah Paket Program Padat Karya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah (Paket)
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	8
2	Bali	9
3	Bangka Belitung	5
4	Banten	21
5	Bengkulu	11
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	7
7	DKI Jakarta	22
8	Gorontalo	4
9	Jambi	27
10	Jawa Barat	158
11	Jawa Tengah	190
12	Jawa Timur	285
13	Kalimantan Barat	12
14	Kalimantan Selatan	2
15	Kalimantan Tengah	8
16	Kalimantan Timur	7
17	Kalimantan Utara	13
18	Kepulauan Bangka Belitung	1
19	Kepulauan Riau	1
20	Lampung	12
21	Maluku Utara	4
22	Nusa Tenggara Barat	18
23	Nusa Tenggara Timur	26
24	Papua	10
25	Papua Barat	4
26	Riau	7
27	Sulawesi Barat	18
28	Sulawesi Selatan	63
29	Sulawesi Tengah	33
30	Sulawesi Tenggara	25
31	Sulawesi Utara	18
32	Sumatera Barat	29
33	Sumatera Selatan	33
34	Sumatera Utara	34
Grand Total		1.125

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.12 Data Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha

3. 12. 1. Jumlah Paket Penerima Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Menurut Provinsi dan Jenis Usaha Tahun 2022

No	Provinsi	Industri Boga	Industri Kreatif	Perdagangan Barang dan Jasa	Perikanan dan Kelautan	Pertanian dan Peternakan	Grand Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	15	16	39	15	67	152
2	Bali	16	13	34	5	24	92
3	Banten	95	46	190	48	72	451
4	Bengkulu	20	14	18	18	64	134
5	Di Yogyakarta	12	14	14	12	25	77
6	Dki Jakarta	277	39	272	11	15	614
7	Gorontalo	8	5	15	2	13	43

No	Provinsi	Industri Boga	Industri Kreatif	Perdagangan Barang dan Jasa	Perikanan dan Kelautan	Pertanian dan Peternakan	Grand Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Jambi	86	40	113	37	129	405
9	Jawa Barat	218	151	446	155	395	1.365
10	Jawa Tengah	238	231	434	125	712	1.740
11	Jawa Timur	371	332	839	163	1.010	2.715
12	Kalimantan Barat	63	42	149	33	167	454
13	Kalimantan Selatan	4	7	10	3	12	36
14	Kalimantan Tengah	16	11	31	20	25	103
15	Kalimantan Timur	23	16	56	22	31	148
16	Kalimantan Utara	39	8	68	30	26	171
17	Kepulauan Bangka Belitung	19	5	25	9	10	68
18	Kepulauan Riau	4	3	5	1	1	14
19	Lampung	31	17	46	22	71	187
20	Maluku	12	5	14	3	7	41
21	Maluku Utara	16	6	24	8	13	67
22	Nusa Tenggara Barat	48	30	72	14	89	253
23	Nusa Tenggara Timur	21	21	18	26	121	207
24	Papua	2	1	15	8	24	50
25	Papua Barat	5	1	4	4	10	24
26	Riau	33	14	39	9	15	110
27	Sulawesi Barat	49	28	87	26	42	232
28	Sulawesi Selatan	110	93	314	21	175	713
29	Sulawesi Tengah	20	13	52	15	29	129
30	Sulawesi Tenggara	23	32	138	32	91	316
31	Sulawesi Utara	44	17	58	14	45	178
32	Sumatera Barat	63	39	81	18	115	316
33	Sumatera Selatan	65	28	118	65	139	415
34	Sumatera Utara	102	44	141	28	165	480
Grand Total		2.168	1.382	3.979	1.022	3.949	12.500

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Keterangan: 1 Paket Bantuan diberikan kepada 10 orang

3. 12. 2. Jumlah Penerima Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Menurut Provinsi dan Jenis Usaha Tahun 2022

No	Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	829	691	1.520
2	Bali	395	525	920
3	Banten	2.432	2.078	4.510
4	Bengkulu	626	714	1.340
5	Di Yogyakarta	444	326	770
6	Dki Jakarta	2.511	3.629	6.140
7	Gorontalo	233	197	430
8	Jambi	2.002	2.048	4.050
9	Jawa Barat	7.911	5.739	13.650
10	Jawa Tengah	10.349	7.051	17.400
11	Jawa Timur	14.731	12.419	27.150
12	Kalimantan Barat	2.415	2.125	4.540
13	Kalimantan Selatan	191	169	360
14	Kalimantan Tengah	511	519	1.030
15	Kalimantan Timur	750	730	1.480
16	Kalimantan Utara	846	864	1.710
17	Kepulauan Bangka Belitung	256	424	680
18	Kepulauan Riau	56	84	140
19	Lampung	991	879	1.870
20	Maluku	179	231	410

No	Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Maluku Utara	313	357	670
22	Nusa Tenggara Barat	1.220	1.310	2.530
23	Nusa Tenggara Timur	1.155	915	2.070
24	Papua	263	237	500
25	Papua Barat	110	130	240
26	Riau	507	593	1.100
27	Sulawesi Barat	1.167	1.153	2.320
28	Sulawesi Selatan	3.965	3.165	7.130
29	Sulawesi Tengah	707	583	1.290
30	Sulawesi Tenggara	1.583	1.577	3.160
31	Sulawesi Utara	837	943	1.780
32	Sumatera Barat	1.397	1.763	3.160
33	Sumatera Selatan	2.371	1.779	4.150
34	Sumatera Utara	2.579	2.221	4.800
Grand Total		66.832	58.168	125.000

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 12. 3. Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan yang Mengikuti Pembekalan Menurut Provinsi Usaha dan Sektor Usaha Periode s/d Bulan Juli Tahun 2023

No	Provinsi Usaha	Sektor Usaha					Grand Total
		Industri Boga	Industri Kreatif	Perdagangan Barang dan Jasa	Perikanan dan Kelautan	Pertanian dan Peternakan	
1	Aceh	5	1	21	4	12	43
2	Bali	11	7	10	1	5	34
3	Banten	10	10	24	5	15	64
4	Bengkulu	2	3	1	4	5	15
5	DI Yogyakarta	3	1	2	1	2	9
6	DKI Jakarta	54	7	29		1	91
7	Gorontalo	5		1		2	8
8	Jambi	7		10	4	10	31
9	Jawa Barat	60	35	93	37	76	301
10	Jawa Tengah	70	54	153	55	240	572
11	Jawa Timur	114	79	202	43	271	709
12	Kalimantan Barat	45	15	39	12	66	177
13	Kalimantan Selatan	3	1				4
14	Kalimantan Tengah	1	4	8	2	4	19
15	Kalimantan Timur	5	1	5	8	4	23
16	Kalimantan Utara	4	3	10	6		23
17	Kepulauan Bangka Belitung	15	2	5	2	3	27
18	Kepulauan Riau		1	1			2
19	Lampung		4	5	8	6	23
20	Maluku	1		2			3
21	Maluku Utara	3		6		1	10
22	Nusa Tenggara Barat	16	12	17	6	30	81
23	Nusa Tenggara Timur			1	2	7	10
24	Papua	1		1	1	1	4
25	Riau	55	28	13	11	15	122
26	Sulawesi Barat	5	7	38	8	17	75
27	Sulawesi Selatan	10	18	36	3	37	104
28	Sulawesi Tengah	5	1	15	1		22
29	Sulawesi Tenggara	11	10	84	18	49	172
30	Sulawesi Utara	3		4	1	2	10
31	Sumatera Barat	23	3	28		8	62
32	Sumatera Selatan	19	6	29	30	37	121
33	Sumatera Utara	7	1	6	3	12	29
Grand Total		573	314	899	276	938	3.000

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.13 Data Tenaga Kerja yang Dipekerjakan Oleh Tenaga Kerja Mandiri Muda

3. 13. 1. Jumlah Tenaga Kerja Yang Tercipta Akibat Perluasan Kesempatan Kerja Dari Tenaga Kerja Mandiri Pemula Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bali	2	3	5
2	D.I.Y	1		1
3	DKI Jakarta	7	1	8
4	Jawa Barat	70	53	123
5	Jawa Tengah	39	26	65
6	Jawa Timur	57	40	97
7	Kab. Kudus		1	1
8	Kalimantan		1	1
9	Maluku Utara		1	1
10	NTB	3	3	6
11	Papua	3	6	9
12	Papua Barat		1	1
13	Sulawesi		1	1
14	Sulawesi Barat	1	1	2
15	Sulawesi Selatan	1	3	4
16	Sulawesi Tenggara	2	2	4
17	Sumatera Selatan	1		1
18	Sumatera Utara	3		3
Grand Total		190	143	333

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 13. 2. Jumlah Tenaga Kerja Yang Tercipta Akibat Perluasan Kesempatan Kerja Dari Tenaga Kerja Mandiri Pemula Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Tahun 2022

No	Provinsi	Status Pekerjaan				Total
		Tetap	Tidak Tetap	Pekerja Keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bali	4	-	1	-	5
2	D.I.Y	-	-	1	-	1
3	DKI Jakarta	3	3	2	-	8
4	Jawa Barat	68	25	22	8	123
5	Jawa Tengah	28	19	13	5	65
6	Jawa Timur	42	27	10	18	97
7	Kab. Kudus	1	-	-	-	1
8	Kalimantan	1	-	-	-	1
9	Maluku Utara	1	-	-	-	1
10	NTB	2	-	3	1	6
11	Papua	4	1	4	-	9
12	Papua Barat	1	-	-	-	1
13	Sulawesi	-	-	1	-	1
14	Sulawesi Barat	-	-	1	1	2
15	Sulawesi Selatan	1	-	3	-	4
16	Sulawesi Tenggara	1	-	1	2	4
17	Sumatera Selatan	1	-	-	-	1
18	Sumatera Utara	-	3	-	-	3
Grand Total		158	78	62	35	333

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.14 Data BLK Komunitas yang Menjadi Inkubator Wirausaha

3. 14. 1. Jumlah BLK Komunitas yang Menjadi Inkubator Wirausaha Berdasarkan Provinsi dan Kejuruan Tahun 2022

Provinsi	Kejuruan										Grand Total
	Bahasa	Desain Grafis Junior/Muda	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	Industri Kreatif	Multimedia	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	Perhotelan	Teknik Informatika	Teknik Las (Welding)	Teknik Otomotif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banten					1	1		1			3
D.I. Yogyakarta									1		1
Jawa Barat		1				3		2		1	7
Jawa Tengah	1	2	1			1	1	1		4	12
Jawa Timur		3	2	3		2		9	1	1	21
Nusa Tenggara Barat		1	1						1		3
Nusa Tenggara Timur						1					1
Sulawesi Barat										1	1
Sulawesi Selatan			1								1
Grand Total	1	7	5	3	1	8	1	13	4	7	50

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 14. 2. Jumlah BLK Komunitas yang Menjadi Inkubator Wirausaha Berdasarkan Provinsi dan Kluster Tahun 2022

Provinsi	Kluster			Grand Total
	Berdaya	Binaan	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banten			3	3
D.I. Yogyakarta	1			1
Jawa Barat	4		3	7
Jawa Tengah	2	5	5	12
Jawa Timur	7	4	10	21
Nusa Tenggara Barat	1		2	3
Nusa Tenggara Timur			1	1
Sulawesi Barat	1			1
Sulawesi Selatan			1	1
Grand Total	16	9	25	50

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.15 Data Tenaga Kerja Pendamping TKA

3. 15. 1. Jumlah Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing Januari – September 2023

Data TK Pendamping	Jumlah
Jasa	43.391
Industri	44.032
Pertanian Maritim	3.760
Total	91.183

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.16 Data TKA yang Diterbitkan

3. 16. 1. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Jenis Usaha Januari – September 2023

Jenis Usaha	Jumlah
Industri	56.353
Jasa	61.483

Pertanian dan Maritim	3.370
Total	121.206

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 16. 2. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Level Jabatan Januari – September 2023

Level Jabatan	Jumlah
Advisor/Consultant	26.215
Direksi	8.049
Komisaris	626
Manager	22.039
Profesional	64.277
Total	121.206

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 16. 3. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Negara Januari – September 2023

Negara	Jumlah
Amerika Serikat	2.728
Australia	2.146
India	6.321
Inggris	2.293
Jepang	11.803
Korea Selatan	11.735
Malaysia	4.241
Philippina	3.824
Republik Rakyat China	57.738
Singapura	1.543
Lain lain	16.834
Total	121.206

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 16. 4. Jumlah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Menurut Provinsi Januari – September 2023

Provinsi	Jumlah
Aceh	61
Bali	3.705
Bangka Belitung	779
Banten	4.526
Bengkulu	32
Daerah Istimewa Yogyakarta	121
DKI Jakarta	10.392
Gorontalo	20
Jambi	97
Jawa Barat	8.004
Jawa Tengah	2.069
Jawa Timur	2.981

Provinsi	Jumlah
Kalimantan Barat	248
Kalimantan Selatan	185
Kalimantan Tengah	113
Kalimantan Timur	144
Kalimantan Utara	130
Kepulauan Riau	3.862
Lampung	87
Maluku	4.092
Maluku Utara	4.078
Nusa Tenggara Barat	541
Nusa Tenggara Timur	138
Papua	353
Papua Barat	49
Riau	4.044
Sulawesi Barat	11
Sulawesi Selatan	380
Sulawesi Tengah	10.898
Sulawesi Tenggara	2.518
Sulawesi Utara	207
Sumatera Barat	62
Sumatera Selatan	356
Sumatera Utara	671
Lintas Provinsi	55.252
Total	121.206

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.17 Data Pengantar Kerja

3. 17. 1. Jumlah Fungsional Pengantar Kerja Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Periode s/d Triwulan III Tahun 2023

Penempatan	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan	
Aceh	4	3	7
Bali	18	13	31
Banten	20	11	31
Bengkulu	6	4	10
Daerah Istimewa Yogyakarta	10	18	28
Dki Jakarta	111	122	233
Gorontalo	2	3	5

Penempatan	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki-laki	Perempuan	
Hongkong		1	1
Jambi	8	13	21
Jawa Barat	74	56	130
Jawa Tengah	51	80	131
Jawa Timur	61	57	118
Jordania	1		1
Kalimantan Barat	11	10	21
Kalimantan Selatan	6	4	10
Kalimantan Tengah	15	11	26
Kalimantan Timur	8	15	23
Kalimantan Utara	3	4	7
Kepulauan Bangka Belitung	6	4	10
Kepulauan Riau	6	10	16
Kepulauan Bangka Belitung	1		1
Kepulauan Riau	1	3	4
Korea		1	1
Lampung	13	14	27
Malaysia	1		1
Maluku	2	2	4
Maluku Utara	1	2	3
Nusa Tenggara Barat	19	7	26
Nusa Tenggara Timur	14	9	23
Papua	1		1
Papua Barat		3	3
Riau	10	10	20
Sulawesi Barat	3	7	10
Sulawesi Selatan	28	50	78

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3. 17. 2. Jumlah Fungsional Pengantar Kerja Berdasarkan Provinsi dan Instansi Penempatan Periode s/d Triwulan III Tahun 2023

Penempatan	Pusat					Daerah			Grand Total
	Kementerian Ketenagakerjaan				BP2MI	Kabupaten	Kota	Provinsi	
	Barenbang	Sekretariat Jenderal	Ditjen Binalavotas	Ditjen Binapenta dan PKK					
Aceh			2		4		1		7
Bali					2	20	4	5	31
Banten			3		6	5	14	3	31
Bengkulu						6		4	10
Daerah Istimewa Yogyakarta					6	11	6	5	28
Dki Jakarta	4	8	1	104	79		23	14	233
Gorontalo						4	1		5
Hongkong				1					1
Jambi						12	3	6	21

Penempatan	Pusat					Daerah			Grand Total
	Kementerian Ketenagakerjaan				BP2MI	Kabupaten	Kota	Provinsi	
	Barenbang	Sekretariat Jenderal	Ditjen Binalavotas	Ditjen Binapenta dan PKK					
Jawa Barat			11	13	9	58	33	6	130
Jawa Tengah			4		11	78	25	13	131
Jawa Timur			4		6	71	24	13	118
Jordania				1					1
Kalimantan Barat					5	12	2	2	21
Kalimantan Selatan					4	2	4		10
Kalimantan Tengah						13	8	5	26
Kalimantan Timur			3			9	11		23
Kalimantan Utara					2	4	1		7
Kepulauan Bangka Belitung			1			6	3		10
Kepulauan Riau					5	4	6	1	16
Kepulauan Bangka Belitung			1						1
Kepulauan Riau						1	2	1	4
Korea				1					1
Lampung					6	14	2	5	27
Malaysia				1					1
Maluku			1				2	1	4
Maluku Utara			1				2		3
Nusa Tenggara Barat			2		4	16	2	2	26
Nusa Tenggara Timur					5	13		5	23
Papua						1			1
Papua Barat			2					1	3
Riau					4	9	3	4	20
Sulawesi Barat						4		6	10
Sulawesi Selatan			6		3	44	10	15	78
Sulawesi Tengah					1	7		1	9
Sulawesi Tenggara			3		1	7	1		12
Sulawesi Utara					3	3		1	7
Sumatera Barat			2		2	18	13	12	47
Sumatera Selatan					4	19	8		31
Sumatera Utara			2		6	14	10	2	34
Taiwan				1					1
Grand Total	4	8	49	122	178	485	224	133	1.203

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.18 Data Petugas Antar Kerja

3. 18. 1. Jumlah Petugas Antar Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Periode Semester I Tahun 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki - laki	Perempuan	
Bali	11	9	20
Banten	45	19	64

Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
	Laki - laki	Perempuan	
D.I. Yogyakarta	9	2	11
DKI Jakarta	3	13	16
Gorontalo	8	5	13
Jambi	13	13	26
Jawa Barat	37	6	43
Jawa Tengah	6	3	9
Jawa Timur	10	8	18
Kalimantan Barat		3	3
Kalimantan Timur	4	5	9
Lampung	2	1	3
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	3	4	7
Nusa Tenggara Barat (NTB)	5	2	7
Nusa Tenggara Timur (NTT)	2	1	3
Riau		2	2
Sulawesi Selatan	1		1
Sulawesi Tenggara		3	3
Sumatera Barat	5	6	11
Sumatera Selatan	1		1
Sumatera Utara	1	5	6
Grand Total	166	110	276

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.19 Data Informasi Jabatan

3.19.1 Jumlah Jabatan Berdasarkan Kategori/Sektor Tahun 2022

No (1)	Kategori/Sektor (2)	Jumlah (3)
1	A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	481
2	B Pertambangan dan Penggalian	1.287
3	C Industri Pengolahan	3.720
4	D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	673
5	E Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	2
6	F Konstruksi	225
7	G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	149
8	H Pengangkutan dan Pergudangan	356
9	I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	209
10	J Informasi dan Komunikasi	154
11	K Aktivitas Keuangan dan Asuransi	290
12	M Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	17
13	N Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	234
14	O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	588
15	P Pendidikan	114
16	Q Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	31
17	R Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	518
TOTAL		9.048

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

3.20 Data Pencari Kerja Terdaftar

3.20.1 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Karirhub Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Bulan Januari s.d September Tahun 2023***

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
Aceh	1,839	1,803	3,642
Bali	3,881	3,433	7,314
Banten	15,602	16,970	32,572
Bengkulu	1,436	975	2,411
Daerah Istimewa Yogyakarta	1,952	1,914	3,866
Dki Jakarta	7,932	5,514	13,446
Gorontalo	475	407	882
Jambi	4,041	2,088	6,129
Jawa Barat	81,368	95,161	176,529
Jawa Tengah	28,408	33,812	62,220
Jawa Timur	29,925	32,191	62,116
Kalimantan Barat	4,043	3,205	7,248
Kalimantan Selatan	3,850	1,332	5,182
Kalimantan Tengah	4,332	1,712	6,044
Kalimantan Timur	2,836	957	3,793
Kalimantan Utara	537	344	881
Kepulauan Bangka Belitung	315	312	627
Kepulauan Riau	2,217	2,339	4,556
Lampung	7,100	11,140	18,240
Maluku	3,227	1,659	4,886
Maluku Utara	7,865	3,258	11,123
Nusa Tenggara Barat	23,670	5,973	29,643
Nusa Tenggara Timur	1,444	2,661	4,105
Papua	592	537	1,129
Papua Barat	578	590	1,168
Riau	3,701	2,096	5,797
Sulawesi Barat	1,318	698	2,016
Sulawesi Selatan	13,275	5,960	19,235
Sulawesi Tengah	5,145	2,228	7,373
Sulawesi Tenggara	3,272	1,942	5,214
Sulawesi Utara	911	790	1,701
Sumatera Barat	4,537	4,666	9,203
Sumatera Selatan	8,327	6,406	14,733
Sumatera Utara	6,852	9,786	16,638
Jumlah	286,803	264,859	551,662

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Keterangan: **Data sangat sementara

Data Pencari Kerja terdaftar berdasarkan Provinsi Domisili dan NIK

Sumber Data, Karirhub Periode Januari s.d September 2023

3.21 Data Lowongan Kerja Terdaftar

3.21.1 Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar di Karirhub Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Bulan Januari s.d September Tahun 2023***

Provinsi	Jenis Kelamin			Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki/Perempuan	
1	2	3	4	5
Aceh	3	20	101	124
Bali	56	98	5,127	5,281
Banten	268	633	1,464	2,365
Bengkulu	280	2	44	326
Daerah Istimewa Yogyakarta	103	193	7,921	8,217
Dki Jakarta	1,046	1,564	11,093	13,703
Gorontalo	5		206	211
Jambi	7	2	205	214
Jawa Barat	4,851	2,726	109,955	117,532
Jawa Tengah	695	6,611	16,161	23,467
Jawa Timur	1,438	2,271	13,491	17,200
Kalimantan Barat	10	8	156	174
Kalimantan Selatan	101	4	199	304
Kalimantan Tengah	525		73	598
Kalimantan Timur	52	54	1,314	1,420
Kalimantan Utara	8		25	33
Kepulauan Bangka Belitung	7		226	233
Kepulauan Riau	162	14	421	597
Lampung	5	1	698	704
Maluku	4		31	35
Maluku Utara	49		51	100
Nusa Tenggara Barat	708	3	18,874	19,585
Nusa Tenggara Timur	21	90	128	239
Papua	9		173	182
Papua Barat	1	1	171	173
Riau	181	15	280	476
Sulawesi Barat			76	76
Sulawesi Selatan	77	37	851	965
Sulawesi Tengah	448	4	281	733
Sulawesi Tenggara		1	624	625
Sulawesi Utara	270	104	408	782
Sumatera Barat	15,316	60	1,579	16,955
Sumatera Selatan	200	9	681	890
Sumatera Utara	436	226	1,326	1,988
Jumlah	27,342	14,751	194,414	236,507

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Keterangan: **Data sangat sementara

Data Lowongan Kerja terdaftar berdasarkan jumlah kuota menurut jenis kelamin yang diperlukan

Sumber Data, Karirhub Periode Januari s.d September 2023

3.22 Tenaga Kerja Terdaftar Ditempatkan

3.22.1 Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Bulan Januari s.d September Tahun 2023***

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
Aceh	8		8
Bali	5	10	15
Bangka Belitung	3		3
Banten	18	2	20
Bengkulu	3		3
DI Yogyakarta	10	7	17
Gorontalo	1		1
Jambi	3		3
Jawa Barat	91	69	160
Jawa Tengah	76	98	174
Jawa Timur	38	34	72
Kalimantan Barat	3	2	5
Kalimantan Selatan	1		1
Kalimantan Tengah	3	1	4
Kalimantan Timur	9	1	10
Kalimantan Utara	2		2
Kepulauan Riau	6		6
Lampung	1		1
Maluku	3	2	5
Maluku Utara	5	1	6
Nusa Tenggara Barat (NTB)	16	3	19
Nusa Tenggara Timur (NTT)	2		2
Papua Barat	3	1	4
Riau	1	1	2
Sulawesi Barat		1	1
Sulawesi Selatan	18	2	20
Sulawesi Tengah	4		4
Sulawesi Tenggara	12	1	13
Sumatera Barat	6	4	10
Sumatera Selatan	10	1	11
Sumatera Utara	16	7	23
Tidak Teridentifikasi		2	2
Grand Total	377	250	627

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Keterangan: ***Data sangat sementara

Data Tenaga Kerja yang ditempatkan berdasarkan Provinsi Domisili dan NIK

Data Tenaga Kerja yang ditempatkan berdasarkan Perkiraan Status Keberkerjaan yang Pernah/Sudah Bekerja

Tidak Teridentifikasi dikarenakan Provinsi Null atau Kosong

BAB IV

DATA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Tabel 4. 1 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP yang Melaporkan Memiliki Struktur Skala Upah Menurut Provinsi, sampai dengan 30 September 2023¹

Provinsi (1)	Status Penerapan Struktur Skala Upah (SUSU)		Total
	Menerapkan (2)	Belum Menerapkan (3)	
Aceh	255	27.286	27.541
Bali	2.791	60.005	62.796
Banten	4.626	112.015	116.641
Bengkulu	187	13.988	14.175
Daerah Istimewa Yogyakarta	902	28.332	29.234
Dki Jakarta	23.034	251.528	274.562
Gorontalo	77	6.412	6.489
Jambi	563	22.079	22.642
Jawa Barat	10.052	298.379	308.431
Jawa Tengah	3.440	138.168	141.608
Jawa Timur	3.848	221.236	225.084
Kalimantan Barat	507	34.235	34.742
Kalimantan Selatan	475	31.267	31.742
Kalimantan Tengah	352	20.362	20.714
Kalimantan Timur	970	43.271	44.241
Kalimantan Utara	86	8.705	8.791
Kepulauan Bangka Belitung	226	11.404	11.630
Kepulauan Riau	1.498	30.513	32.011
Lampung	364	41.074	41.438
Maluku	1.127	9.325	10.452
Maluku Utara	39	7.430	7.469

¹ Perusahaan yang terklasifikasi memiliki SUSU merupakan perusahaan yang terdaftar WLKP, melapor memiliki SUSU, melapor min. 1 Tenaga Kerja, dan berstatus sebagai Perusahaan Pusat

Provinsi	Status Penerapan Struktur Skala Upah (SUSU)		Total
	Menerapkan (2)	Belum Menerapkan (3)	
(1)			(4)
Nusa Tenggara Barat	366	25.819	26.185
Nusa Tenggara Timur	152	16.085	16.237
Papua	193	16.048	16.241
Papua Barat	93	9.564	9.657
Riau	2.045	41.606	43.651
Sulawesi Barat	29	8.976	9.005
Sulawesi Selatan	659	63.017	63.676
Sulawesi Tengah	175	20.599	20.774
Sulawesi Tenggara	156	21.246	21.402
Sulawesi Utara	189	17.644	17.833
Sumatera Barat	495	31.158	31.653
Sumatera Selatan	505	39.406	39.911
Sumatera Utara	1.643	64.153	65.796
Tidak Teridentifikasi	947	31.546	32.493
Total	63.066	1.823.881	1.886.947

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 30 September 2023

Tabel 4. 2 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP yang Melaporkan Memiliki Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama Menurut Provinsi, sampai dengan 30 September 2023²

Provinsi (1)	Memiliki PP (2)	Memiliki PKB (3)	Belum Memiliki/Tidak Melaporkan PP/PKB (4)	Total (5)
Aceh	159	111	27.271	27.541
Bali	1.301	667	60.828	62.796
Banten	2.752	1.163	112.726	116.641
Bengkulu	143	58	13.974	14.175
Daerah Istimewa Yogyakarta	574	284	28.376	29.234
Dki Jakarta	13.572	4.311	256.679	274.562
Gorontalo	59	10	6.420	6.489
Jambi	354	190	22.098	22.642
Jawa Barat	6.413	2.842	299.176	308.431
Jawa Tengah	2.213	1.074	138.321	141.608
Jawa Timur	2.780	1.371	220.933	225.084
Kalimantan Barat	313	148	34.281	34.742
Kalimantan Selatan	277	131	31.334	31.742
Kalimantan Tengah	208	122	20.384	20.714
Kalimantan Timur	615	307	43.319	44.241
Kalimantan Utara	53	28	8.710	8.791
Kepulauan Bangka Belitung	190	67	11.373	11.630
Kepulauan Riau	931	436	30.644	32.011
Lampung	259	131	41.048	41.438
Maluku	136	83	10.233	10.452
Maluku Utara	22	8	7.439	7.469
Nusa Tenggara Barat	148	119	25.918	26.185

² Perusahaan yang terklasifikasi memiliki PP/PKB merupakan perusahaan yang terdaftar WLKP, melapor memiliki PP/PKB, melapor min. 1 Tenaga Kerja, dan berstatus sebagai Perusahaan Pusat

Provinsi (1)	Memiliki PP (2)	Memiliki PKB (3)	Belum Memiliki/Tidak Melaporkan PP/PKB (4)	Total (5)
Nusa Tenggara Timur	66	44	16.127	16.237
Papua	102	56	16.083	16.241
Papua Barat	61	38	9.558	9.657
Riau	1.287	601	41.763	43.651
Sulawesi Barat	21	16	8.968	9.005
Sulawesi Selatan	367	229	63.080	63.676
Sulawesi Tengah	126	54	20.594	20.774
Sulawesi Tenggara	70	33	21.299	21.402
Sulawesi Utara	142	82	17.609	17.833
Sumatera Barat	304	160	31.189	31.653
Sumatera Selatan	319	217	39.375	39.911
Sumatera Utara	1.004	534	64.258	65.796
Tidak Teridentifikasi	691	214	31.588	32.493
Total	38.032	15.939	1.832.976	1.886.947

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 30 September 2023

Tabel 4. 3 Jumlah Data Perselisihan yang Ditangani dan Diselesaikan oleh Mediator Menurut Jenis Kasus Perselisihan HI dan Status Penyelesaian, Tahun 2023

Jenis Kasus (1)	Jumlah Kasus (2)	Penyelesaian				Sisa Kasus (7)
		Bipartit (3)	Mediasi ³ (4)	Hakim HI (5)	Jumlah (6)	
Perselisihan Hak	1.644	227	1.354	-	1.581	63
Perselisihan Kepentingan	257	40	199	-	239	18
Perselisihan PHK	4.849	448	4.273	3	4.724	125
Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh	98	7	89	-	96	2
Total	6.848	722	5.915	3	6.640	208

Sumber: Ditjen. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos TK, update sampai 30 September 2023

³ Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Tabel 4. 4 Jumlah Penutupan Perusahaan Terdaftar WLKP Menurut Provinsi, sampai dengan 30 September 2023⁴

Provinsi	Jumlah
(1)	(2)
Aceh	-
Bali	22
Banten	58
Bengkulu	-
Daerah Istimewa Yogyakarta	19
Dki Jakarta	135
Gorontalo	-
Jambi	5
Jawa Barat	108
Jawa Tengah	24
Jawa Timur	25
Kalimantan Barat	5
Kalimantan Selatan	32
Kalimantan Tengah	3
Kalimantan Timur	1
Kalimantan Utara	-
Kepulauan Bangka Belitung	6
Kepulauan Riau	9
Lampung	6
Maluku	1
Maluku Utara	-
Nusa Tenggara Barat	1

⁴ Perusahaan yang dihitung merupakan perusahaan terdaftar di WLKP dan berstatus masih aktif

Provinsi	Jumlah
(1)	(2)
Nusa Tenggara Timur	-
Papua	-
Papua Barat	-
Riau	5
Sulawesi Barat	-
Sulawesi Selatan	7
Sulawesi Tengah	1
Sulawesi Tenggara	-
Sulawesi Utara	-
Sumatera Barat	1
Sumatera Selatan	6
Sumatera Utara	11
Tidak Teridentifikasi	3
Total	494

Sumber: Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 30 September 2023

Tabel 4.5 Jumlah Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia Menurut Provinsi, Status Keaktifan, dan Segmen Kepesertaan Sampai Dengan Bulan September Tahun 2023

NO.	PROV/INSI	Kepesertaan Aktif				Kepesertaan Non Aktif		
		Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jasa Konstruksi	Jumlah	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jumlah
1	Aceh	278.356	68.955	261.375	608.686	110.584	7.276	117.860
2	Sumatera Utara	980.194	370.796	665.196	2.016.186	795.748	48.383	844.131
3	Sumatera Barat	287.322	192.046	267.452	746.820	184.199	15.605	199.804
4	Riau	621.181	229.964	264.660	1.115.805	810.682	17.890	828.572
5	Jambi	255.467	149.636	259.926	665.029	341.639	12.627	354.266
6	Sumatera Selatan	486.855	121.321	315.136	923.312	290.984	20.450	311.434
7	Bengkulu	103.231	34.243	26.415	163.889	62.955	7.993	70.948
8	Lampung	331.827	88.529	134.146	554.502	196.327	8.789	205.116
9	Kep. Bangka Belitung	106.008	29.225	32.407	167.640	85.205	3.202	88.407
10	Kepulauan Riau	392.812	123.610	132.198	648.620	637.558	14.398	651.956
11	DKI Jakarta	5.153.912	884.199	958.787	6.996.898	4.473.062	209.571	4.682.633
12	Jawa Barat	3.253.515	783.567	776.085	4.813.167	2.912.548	144.245	3.056.793
13	Jawa Tengah	2.380.013	520.469	902.133	3.802.615	1.248.061	56.070	1.304.131
14	DI Yogyakarta	352.506	108.996	86.231	547.733	173.949	14.951	188.900
15	Jawa Timur	2.723.642	766.885	1.104.773	4.595.300	1.363.295	119.484	1.482.779
16	Banten	1.503.889	598.560	329.789	2.432.238	1.315.016	62.507	1.377.523
17	Bali	540.300	266.208	211.248	1.017.756	271.032	16.213	287.245
18	Nusa Tenggara Barat	229.599	165.862	176.459	571.920	58.841	5.414	64.255
19	Nusa Tenggara Timur	170.214	123.957	125.974	420.145	42.136	20.529	62.665
20	Kalimantan Barat	397.426	111.352	206.076	714.854	386.822	8.553	395.375
21	Kalimantan Tengah	371.933	75.228	222.545	669.706	504.814	21.131	525.945
22	Kalimantan Selatan	334.778	124.285	118.314	577.377	298.336	11.953	310.289
23	Kalimantan Timur	683.357	174.219	348.247	1.205.823	835.532	20.174	855.706
24	Kalimantan Utara	100.994	76.853	49.376	227.223	150.625	3.698	154.323
25	Sulawesi Utara	314.656	246.680	53.251	614.587	128.384	6.307	134.691
26	Sulawesi Tengah	290.456	106.917	134.987	532.360	127.886	8.085	135.971
27	Sulawesi Selatan	571.473	205.689	198.797	975.959	237.269	17.250	254.519
28	Sulawesi Tenggara	142.462	64.369	39.641	246.472	54.246	1.870	56.116
29	Gorontalo	88.287	104.846	51.659	244.792	21.763	1.756	23.519
30	Sulawesi Barat	67.284	60.428	58.988	186.700	11.525	3.779	15.304
31	Maluku	90.087	49.052	40.590	179.729	69.114	6.385	75.499
32	Maluku Utara	138.621	37.011	40.697	216.329	66.585	5.216	71.801
33	Papua Barat	109.274	140.876	114.762	364.912	112.458	6.669	119.127
34	Papua	158.687	79.614	239.666	477.967	126.626	7.392	134.018
	Jumlah	24.010.618	7.284.447	8.947.986	40.243.051	18.505.806	935.815	19.441.621

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan
Jumlah kepesertaan pada program BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dijumlahkan

Tabel 4.6 Jumlah Perusahaan dan Peserta Aktif Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penerima Upah di Indonesia Menurut Provinsi dan Program Kepesertaan Sampai Dengan Bulan September Tahun 2023

NO.	PROVINSI	Perusahaan Terdaftar	Tenaga Kerja (Orang)			
			JKK	JKm	JHT	JP
1	Aceh	21.459	278.356	278.356	83.595	48.098
2	Sumatera Utara	45.749	980.194	980.194	658.081	455.749
3	Sumatera Barat	16.500	287.322	287.322	137.895	94.219
4	Riau	19.848	621.181	621.181	469.191	382.708
5	Jambi	15.371	255.467	255.467	141.174	104.309
6	Sumatera Selatan	14.933	486.855	486.855	282.705	237.699
7	Bengkulu	4.040	103.231	103.231	52.352	40.280
8	Lampung	12.402	331.827	331.827	150.815	118.742
9	Kep. Bangka Belitung	3.786	106.008	106.008	78.267	43.529
10	Kepulauan Riau	15.570	392.812	392.812	339.726	278.593
11	DKI Jakarta	123.113	5.153.912	5.153.912	4.671.694	4.270.104
12	Jawa Barat	86.315	3.253.515	3.253.515	2.517.722	2.099.533
13	Jawa Tengah	100.314	2.380.013	2.380.013	1.779.130	1.458.622
14	DI Yogyakarta	17.663	352.506	352.506	268.123	195.709
15	Jawa Timur	122.331	2.723.642	2.723.642	1.798.268	1.278.994
16	Banten	39.892	1.503.889	1.503.889	1.231.267	1.035.531
17	Bali	27.213	540.300	540.300	362.290	262.402
18	Nusa Tenggara Barat	9.324	229.599	229.599	82.090	56.355
19	Nusa Tenggara Timur	8.253	170.214	170.214	62.950	30.183
20	Kalimantan Barat	13.812	397.426	397.426	284.112	221.785
21	Kalimantan Tengah	10.186	371.933	371.933	288.571	238.980
22	Kalimantan Selatan	11.094	334.778	334.778	258.829	189.655
23	Kalimantan Timur	17.735	683.357	683.357	575.884	497.069
24	Kalimantan Utara	4.503	100.994	100.994	60.267	46.665
25	Sulawesi Utara	5.499	314.656	314.656	78.574	57.698
26	Sulawesi Tengah	8.053	290.456	290.456	172.309	135.393
27	Sulawesi Selatan	27.204	571.473	571.473	222.110	143.310
28	Sulawesi Tenggara	5.829	142.462	142.462	74.944	54.034
29	Gorontalo	3.187	88.287	88.287	19.659	11.779
30	Sulawesi Barat	3.862	67.284	67.284	13.986	9.958
31	Maluku	6.313	90.087	90.087	32.569	20.126
32	Maluku Utara	3.418	138.621	138.621	103.327	85.512
33	Papua Barat	6.379	109.274	109.274	40.601	27.829
34	Papua	9.298	158.687	158.687	86.263	68.134
	Jumlah	840.448	24.010.618	24.010.618	17.479.340	14.299.286

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah kepesertaan pada program BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dijumlahkan

Tabel 4.7 Jumlah Peserta Aktif Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di Indonesia Menurut Provinsi dan Program Kepesertaan Sampai Dengan Bulan September Tahun 2023

NO.	PROVINSI	JKK	JKm	JHT	JP
1	Aceh	68.955	68.955	2.228	-
2	Sumatera Utara	370.796	370.796	27.639	-
3	Sumatera Barat	192.046	192.046	5.661	-
4	Riau	229.964	229.964	13.199	-
5	Jambi	149.636	149.636	4.523	-
6	Sumatera Selatan	121.321	121.321	6.652	-
7	Bengkulu	34.243	34.243	995	-
8	Lampung	88.529	88.529	5.171	-
9	Kep. Bangka Belitung	29.225	29.225	2.403	-
10	Kepulauan Riau	123.610	123.610	7.067	-
11	DKI Jakarta	884.199	884.199	126.245	-
12	Jawa Barat	783.567	783.567	65.867	-
13	Jawa Tengah	520.469	520.469	45.021	-
14	DI Yogyakarta	108.996	108.996	6.270	-
15	Jawa Timur	766.885	766.885	53.854	-
16	Banten	598.560	598.560	34.714	-
17	Bali	266.208	266.208	37.812	-
18	Nusa Tenggara Barat	165.862	165.862	8.483	-
19	Nusa Tenggara Timur	123.957	123.957	33.395	-
20	Kalimantan Barat	111.352	111.352	7.534	-
21	Kalimantan Tengah	75.228	75.228	6.200	-
22	Kalimantan Selatan	124.285	124.285	8.808	-
23	Kalimantan Timur	174.219	174.219	9.269	-
24	Kalimantan Utara	76.853	76.853	2.105	-
25	Sulawesi Utara	246.680	246.680	5.930	-
26	Sulawesi Tengah	106.917	106.917	3.560	-
27	Sulawesi Selatan	205.689	205.689	6.521	-
28	Sulawesi Tenggara	64.369	64.369	837	-
29	Gorontalo	104.846	104.846	3.057	-
30	Sulawesi Barat	60.428	60.428	2.073	-
31	Maluku	49.052	49.052	3.468	-
32	Maluku Utara	37.011	37.011	2.625	-
33	Papua Barat	140.876	140.876	2.671	-
34	Papua	79.614	79.614	6.587	-
	Jumlah	7.284.447	7.284.447	558.444	-

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah kepesertaan pada program BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dijumlahkan

Tabel 4.8 Jumlah Peserta Aktif Jasa Konstruksi di Indonesia Menurut Provinsi, Sampai Dengan Bulan September 2023

NO.	PROVINSI	JUMLAH
1	Aceh	261.375
2	Sumatera Utara	665.196
3	Sumatera Barat	267.452
4	Riau	264.660
5	Jambi	259.926
6	Sumatera Selatan	315.136
7	Bengkulu	26.415
8	Lampung	134.146
9	Kep. Bangka Belitung	32.407
10	Kepulauan Riau	132.198
11	DKI Jakarta	958.787
12	Jawa Barat	776.085
13	Jawa Tengah	902.133
14	DI Yogyakarta	86.231
15	Jawa Timur	1.104.773
16	Banten	329.789
17	Bali	211.248
18	Nusa Tenggara Barat	176.459
19	Nusa Tenggara Timur	125.974
20	Kalimantan Barat	206.076
21	Kalimantan Tengah	222.545
22	Kalimantan Selatan	118.314
23	Kalimantan Timur	348.247
24	Kalimantan Utara	49.376
25	Sulawesi Utara	53.251
26	Sulawesi Tengah	134.987
27	Sulawesi Selatan	198.797
28	Sulawesi Tenggara	39.641
29	Gorontalo	51.659
30	Sulawesi Barat	58.988
31	Maluku	40.590
32	Maluku Utara	40.697
33	Papua Barat	114.762
34	Papua	239.666
Jumlah		8.947.986

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

Keterangan:

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada segmen Jasa Konstruksi hanya dapat mengikuti program JKK dan JKm

Tabel 4.9 Jumlah Tenaga Kerja Aktif Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Sampai Dengan Bulan September Tahun 2023

NO.	PROVINSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Aceh	493.118	115.568	608.686
2	Sumatera Utara	1.526.919	489.267	2.016.186
3	Sumatera Barat	541.467	205.353	746.820
4	Riau	843.094	272.711	1.115.805
5	Jambi	526.892	138.137	665.029
6	Sumatera Selatan	750.448	172.864	923.312
7	Bengkulu	111.180	52.709	163.889
8	Lampung	410.887	143.615	554.502
9	Kep. Bangka Belitung	120.386	47.254	167.640
10	Kepulauan Riau	469.411	179.209	648.620
11	DKI Jakarta	5.125.946	1.870.952	6.996.898
12	Jawa Barat	3.226.908	1.586.259	4.813.167
13	Jawa Tengah	2.456.784	1.345.831	3.802.615
14	DI Yogyakarta	355.106	192.627	547.733
15	Jawa Timur	3.314.381	1.280.919	4.595.300
16	Banten	1.563.384	868.854	2.432.238
17	Bali	688.886	328.870	1.017.756
18	Nusa Tenggara Barat	432.379	139.541	571.920
19	Nusa Tenggara Timur	286.635	133.510	420.145
20	Kalimantan Barat	564.056	150.798	714.854
21	Kalimantan Tengah	533.644	136.062	669.706
22	Kalimantan Selatan	443.987	133.390	577.377
23	Kalimantan Timur	980.427	225.396	1.205.823
24	Kalimantan Utara	175.142	52.081	227.223
25	Sulawesi Utara	388.405	226.182	614.587
26	Sulawesi Tengah	413.461	118.899	532.360
27	Sulawesi Selatan	645.597	330.362	975.959
28	Sulawesi Tenggara	184.320	62.152	246.472
29	Gorontalo	159.017	85.775	244.792
30	Sulawesi Barat	138.802	47.898	186.700
31	Maluku	125.104	54.625	179.729
32	Maluku Utara	176.019	40.310	216.329
33	Papua Barat	265.722	99.190	364.912
34	Papua	394.150	83.817	477.967
Jumlah		28.832.064	11.410.987	40.243.051

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

BAB V

DATA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

5.1 Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia menurut Provinsi

Tabel 5.1 Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Provinsi Tahun 2022

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
1	Aceh	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	3 Korwil	Kesepakatan Hasil Rakorda
2	Sumatera Utara	Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan	6 UPT	Pergub No. 6 Tahun 2018
3	Sumatera Barat	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan	3 UPT	
4	Riau	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPT	Pergub No. 50 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
5	Kep. Riau	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub KEPRI No. 53 Tahun 2017
6	Jambi	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	3 UPTD	Pergub No. 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Disnakertrans Prov. Jambi
7	Sumatera Selatan	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	Belum Terbentuk	Perda Prov. Sumsel No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub Prov. Sumsel No. 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
8	Kep. Bangka Belitung	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan Jamsos	1 Korwil	
9	Bengkulu	Bidang Hubungan Industrial Pengawasan Ketenagakerjaan	3 UPTD	Pergub Bengkulu No.67 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
10	Lampung	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Belum Terbentuk	
11	DKI Jakarta	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Belum Terbentuk	Pergub No. 271 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Struktur Tatakerja
12	Jawa Barat	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	5 UPTD	1. PERDA PRO JABAR NO. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Jabar 2. PERGUB JABAR NO. 46 TAHUN 2016 Tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di lingkungan Pemprov. Jabar 3. PERGUB JABAR NO. 88 TAHUN 2016 Tentang Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. PERGUB JABAR NO. 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan UPTD Disnakertrans 5. PERGUB JABAR NO. 78 Tahun 2017 Tentang Tupoksi di UPTD Disnakertrans
13	Banten	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub No 19 Tahun 2018 Tentang UPT Cabang Dinas
14	Jawa Tengah	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	6 Satwasnaker (Kelas B)	Pergub No. 103 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tatakerja UPT Disnakertrans Provinsi Jateng
15	DI Yogyakarta	Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tidak membentuk UPT	Pergub DIY No. 62 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Jawa Timur	Bidang Pengawasan	6 Korwil	Dasar Hukum KoRwil SK Kepala Dinas No

No.	Provinsi	Bidang	UPTD/Korwil	Dasar Hukum
		Ketenagakerjaan dan K3		560/1140/108.5/2017 tentang Penunjukan Pengurus Korwil Pengawasan KK di Jatim
17	Bali	Bidang BHI dan Pengawasan Tenaga Kerja	Tidak membentuk UPT	Perda No 10 Tahun 2016 dan Pergub No 84
18	NTB	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Daerah Provinsi NTB
19	NTT	Bidang PHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan	4 Korwil	
20	Kalimantan Barat	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	dalam proses
21	Kalimantan Tengah	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 57 Tahun 2017
22	Kalimantan Selatan	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub No 143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
23	Kalimantan Timur	Bidang Pembinaan dan Pengawasan	3 Korwil	
24	Kalimantan Utara	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan		Pergub No. 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
25	Sulawesi Utara	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1 UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja 4 Korwil	Perda No. 04 Tahun 2016 , dan SK Kepala Dinas No. 560/DTKT.V/02/2017 Tahun 2017
26	Sulawesi Barat	Bidang Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub Sulbar No. 41 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27	Sulawesi Tengah	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	2 UPTD	
28	Sulawesi Tenggara	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja	Belum Terbentuk	Pergub No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Disnaker Sultra
29	Sulawesi Selatan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	4 UPTD	Pergub Sulsel No. 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
30	Gorontalo	Bidang Transmigrasi	3 Korwil	Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Daerah Provinsi Gorontalo
31	Maluku	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	5 Balai Pengawas Ketenagakerjaan	Pergub No. 39 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan UPTD Wasnaker Maluku Utara
32	Maluku Utara	Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub No. 39 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan UPTD Wasnaker Maluku Utara
33	Papua Barat	Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	2 UPTD	Pergub masih dalam proses
34	Papua	Tidak ada bidang pengawasan ketenagakerjaan	1 UPTD	

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.2 Jumlah Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Provinsi dan Bidang

**Tabel 5.2 Jumlah Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Provinsi dan Bidang
s.d Agustus Tahun 2023**

No.	Provinsi	Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3	Konsultan dan Pembinaan K3	Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3	Pemeriksaan/ Pengujian dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja	Jumlah
1	Aceh	0	7	2	1	10
2	Bali	1	1	36	0	38
3	Banten	10	102	157	9	278
4	DI Yogyakarta	2	88	18	0	108
5	DKI Jakarta	62	438	257	28	785
6	Jambi	0	8	1	1	10
7	Jawa Barat	28	370	352	22	772
8	Jawa Tengah	3	69	106	9	187
9	Jawa Timur	36	170	137	4	347
10	Kalimantan Barat	0	2	29	2	33
11	Kalimantan Selatan	1	0	4	2	7
12	Kalimantan Tengah	0	0	1	1	2
13	Kalimantan Timur	0	98	57	13	168
14	Kep. Bangka Belitung	0	1	3	0	4
15	Kep. Riau	0	84	76	7	167
16	Lampung	2	8	6	1	17
17	Nusa Tenggara Barat	1	2	1	0	4
18	Papua	0	1	0	0	1
19	Riau	10	52	44	3	109
20	Sulawesi Selatan	0	40	29	1	70
21	Sulawesi Tengah	0	4	0	0	4
22	Sulawesi Utara	0	4	3	1	8
23	Sumatera Barat	0	14	7	1	22
24	Sumatera Selatan	0	35	14	3	52
25	Sumatera Utara	20	75	52	8	155
Jumlah		176	1.673	1.392	117	3.358

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.3 Jumlah Perusahaan Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Tabel 5.3.1 Jumlah Perusahaan Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Provinsi dan Penghargaan

s.d Agustus Tahun 2023

No	Provinsi	Penghargaan				Jumlah
		Sertifikat Emas	Sertifikat Emas dan Bendera Emas	Sertifikat Perak	Sertifikat Perak dan Bendera Perak	
1	Aceh	4	4	6	-	14
2	Sumatera Utara	13	11	12	-	36
3	Sumatera Barat	1	7	2	-	10
4	Riau	18	34	51	-	103
5	Jambi	1	4	2	2	9
6	Sumatera Selatan	9	13	3	-	25
7	Bengkulu	-	1	-	-	1
8	Lampung	1	2	1	-	4
9	Kep. Bangka Belitung	3	-	-	-	3
10	Kep. Riau	4	6	14	-	24
11	DKI Jakarta	105	40	69	1	215
12	Jawa Barat	75	40	74	-	189
13	Jawa Tengah	10	11	18	-	39
14	DI Yogyakarta	8	2	3	1	14
15	Jawa Timur	61	40	51	-	152
16	Banten	34	31	36	-	101
17	Bali	15	3	2	-	20
18	Nusa Tenggara Barat	1	2	6	-	9
19	Nusa Tenggara Timur	3	-	5	-	8
20	Kalimantan Barat	15	1	13	-	29
21	Kalimantan Tengah	3	2	2	-	7
22	Kalimantan Selatan	2	4	-	-	6
23	Kalimantan Timur	16	7	14	-	37
24	Kalimantan Utara	-	-	2	-	2
25	Sulawesi Utara	3	2	6	-	11
26	Sulawesi Tengah	-	1	-	-	1
27	Sulawesi Selatan	12	5	7	-	24
28	Sulawesi Tenggara	-	-	3	-	3
29	Gorontalo	-	1	-	-	1
30	Sulawesi Barat	-	3	-	-	3
31	Maluku	1	-	1	-	2
32	Maluku Utara	4	-	1	-	5
33	Papua Barat	4	1	-	-	5
34	Papua	2	4	5	-	11
35	Papua Tengah	-	1	-	-	1
Jumlah		428	283	409	4	1.124

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Tabel 5.3.2 Jumlah Perusahaan Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Penerapan

s.d. Agustus Tahun 2023

No.	Provinsi	Kategori Tingkat Penerapan			Jumlah
		Awal (64 Kriteria)	Transisi (122 Kriteria)	Lanjutan (166 Kriteria)	
1	Aceh	9	-	5	14
2	Sumatera Utara	25	-	11	36
3	Sumatera Barat	3	-	7	10
4	Riau	69	-	34	103
5	Jambi	-	3	6	9
6	Sumatera Selatan	11	1	13	25
7	Bengkulu	-	-	1	1
8	Lampung	1	1	2	4
9	Kep. Bangka Belitung	3	-	-	3
10	Kep. Riau	18	-	6	24
11	DKI Jakarta	163	9	43	215
12	Jawa Barat	140	8	41	189
13	Jawa Tengah	26	2	11	39
14	DI Yogyakarta	9	2	3	14
15	Jawa Timur	99	12	41	152
16	Banten	65	5	31	101
17	Bali	16	1	3	20
18	Nusa Tenggara Barat	7	-	2	9
19	Nusa Tenggara Timur	8	-	-	8
20	Kalimantan Barat	28	-	1	29
21	Kalimantan Tengah	5	-	2	7
22	Kalimantan Selatan	2	-	4	6
23	Kalimantan Timur	30	-	7	37
24	Kalimantan Utara	2	-	-	2
25	Sulawesi Utara	9	-	2	11
26	Sulawesi Tengah	-	-	1	1
27	Sulawesi Selatan	16	-	8	24
28	Sulawesi Tenggara	3	-	-	3
29	Gorontalo	-	-	1	1
30	Sulawesi Barat	-	-	3	3
31	Maluku	2	-	-	2
32	Maluku Utara	5	-	-	5
33	Papua Barat	4	-	1	5
34	Papua	7	-	4	11
35	Papua Tengah	-	-	1	1
Jumlah		785	44	295	1.124

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.4 Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan SMK3 dan Kecelakaan Nihil (Zero Accident)

Tabel 5.4.1. Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan SMK3 menurut Provinsi dan Penghargaan

Tahun 2023

No.	Provinsi	Penghargaan				Jumlah
		Sertifikat Emas	Sertifikat Emas Dan Bendera Emas	Sertifikat Perak	Sertifikat Perak Dan Bendera Perak	
1	Aceh	9	8	26	1	44
2	Sumatera Utara	15	52	20	-	87
3	Sumatera Barat	3	14	1	4	22
4	Riau	20	49	49	-	118
5	Jambi	3	14	-	4	21
6	Sumatera Selatan	11	13	4	1	29
7	Bengkulu	-	2	-	-	2
8	Lampung	2	6	5	-	13
9	Kep. Bangka Belitung	7	4	-	-	11
10	Kepulauan Riau	5	13	15	1	34
11	DKI Jakarta	143	85	104	6	338
12	Jawa Barat	86	119	84	-	289
13	Jawa Tengah	21	27	37	-	85
14	D.I. Yogyakarta	7	2	8	-	17
15	Jawa Timur	74	83	70	-	227
16	Banten	34	50	37	2	123
17	Bali	14	4	3	-	21
18	Nusa Tenggara Barat	1	2	10	-	13
19	Nusa Tenggara Timur	2	1	4	-	7
20	Kalimantan Barat	19	7	11	-	37
21	Kalimantan Tengah	11	1	3	-	15
22	Kalimantan Selatan	6	6	2	-	14
23	Kalimantan Timur	16	20	18	-	54
24	Kalimantan Utara	1	1	3	-	5
25	Sulawesi Utara	2	5	9	-	16
26	Sulawesi Tengah	1	5	2	-	8
27	Sulawesi Selatan	13	13	16	1	43
28	Sulawesi Tenggara	3	2	10	-	15
29	Gorontalo	1	1	-	-	2
30	Sulawesi Barat	-	3	1	-	4
31	Maluku	1	1	1	-	3
32	Maluku Utara	6	1	1	-	8
33	Papua Barat	6	2	-	-	8
34	Papua	7	4	5	-	16
35	Papua Tengah	-	1	-	-	1
Jumlah		550	621	559	20	1.750

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Tabel 5.4.2. Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan SMK3 menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Penerapan

Tahun 2023

No.	Provinsi	Kategori Tingkat Penerapan			Jumlah
		Awal (64 Kriteria)	Transisi (122 Kriteria)	Lanjutan (166 Kriteria)	
1	Aceh	35	-	9	44
2	Sumatera Utara	35	-	52	87
3	Sumatera Barat	4	-	18	22
4	Riau	68	1	49	118
5	Jambi	3	-	18	21
6	Sumatera Selatan	14	1	14	29
7	Bengkulu	-	-	2	2
8	Lampung	7	-	6	13
9	Kep. Bangka Belitung	7	-	4	11
10	Kepulauan Riau	20	-	14	34
11	DKI Jakarta	237	10	91	338
12	Jawa Barat	160	10	119	289
13	Jawa Tengah	57	1	27	85
14	D.I. Yogyakarta	14	1	2	17
15	Jawa Timur	137	7	83	227
16	Banten	67	4	52	123
17	Bali	15	2	4	21
18	Nusa Tenggara Barat	11	-	2	13
19	Nusa Tenggara Timur	6	-	1	7
20	Kalimantan Barat	30	-	7	37
21	Kalimantan Tengah	14	-	1	15
22	Kalimantan Selatan	8	-	6	14
23	Kalimantan Timur	34	-	20	54
24	Kalimantan Utara	4	-	1	5
25	Sulawesi Utara	11	-	5	16
26	Sulawesi Tengah	2	1	5	8
27	Sulawesi Selatan	29	-	14	43
28	Sulawesi Tenggara	13	-	2	15
29	Gorontalo	1	-	1	2
30	Sulawesi Barat	1	-	3	4
31	Maluku	2	-	1	3
32	Maluku Utara	7	-	1	8
33	Papua Barat	6	-	2	8
34	Papua	12	-	4	16
35	Papua Tengah	-	-	1	1
Jumlah		1.071	38	641	1.750

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

Tabel 5.4.3. Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan SMK3 menurut Provinsi dan Tingkat Pencapaian Penerapan

Tahun 2023

No.	Provinsi	Tingkat Pencapaian Penerapan		Jumlah
		Baik	Memuaskan	
1	Aceh	27	17	44
2	Sumatera Utara	20	67	87
3	Sumatera Barat	5	17	22
4	Riau	50	68	118
5	Jambi	4	17	21
6	Sumatera Selatan	5	24	29
7	Bengkulu	-	2	2
8	Lampung	5	8	13
9	Kep. Bangka Belitung	-	11	11
10	Kepulauan Riau	16	18	34
11	DKI Jakarta	110	228	338
12	Jawa Barat	84	205	289
13	Jawa Tengah	38	47	85
14	D.I. Yogyakarta	8	9	17
15	Jawa Timur	69	158	227
16	Banten	39	84	123
17	Bali	3	18	21
18	Nusa Tenggara Barat	10	3	13
19	Nusa Tenggara Timur	4	3	7
20	Kalimantan Barat	11	26	37
21	Kalimantan Tengah	3	12	15
22	Kalimantan Selatan	2	12	14
23	Kalimantan Timur	18	36	54
24	Kalimantan Utara	3	2	5
25	Sulawesi Utara	9	7	16
26	Sulawesi Tengah	2	6	8
27	Sulawesi Selatan	17	26	43
28	Sulawesi Tenggara	10	5	15
29	Gorontalo	-	2	2
30	Sulawesi Barat	1	3	4
31	Maluku	1	2	3
32	Maluku Utara	1	7	8
33	Papua Barat	-	8	8
34	Papua	5	11	16
35	Papua Tengah	-	1	1
Jumlah		580	1.170	1.750

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

**Tabel 5.4.4 Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Zero Accident (ZA) menurut Provinsi
Tahun 2023**

No.	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	60
2	Sumatra Utara	258
3	Sumatra Barat	36
4	Riau	38
5	Jambi	43
6	Sumatra Selatan	59
7	Bengkulu	8
8	Lampung	11
9	Kep. Bangka Belitung	6
10	Kepulauan Riau	16
11	DKI Jakarta	128
12	Jawa Barat	131
13	Jawa Tengah	75
14	DI Yogyakarta	21
15	Jawa Timur	256
16	Banten	114
17	Bali	7
18	Nusa Tenggara Barat	12
19	Nusa Tenggara Timur	7
20	Kalimantan Barat	20
21	Kalimantan Tengah	75
22	Kalimantan Selatan	116
23	Kalimantan Timur	234
24	Kalimantan Utara	8
25	Sulawesi Utara	4
26	Sulawesi Tengah	2
27	Sulawesi Selatan	37
28	Sulawesi Tenggara	21
29	Gorontalo	6
30	Sulawesi Barat	-
31	Maluku	1
32	Maluku Utara	-
33	Papua Barat	-
34	Papua	1
35	Papua Tengah	1
Jumlah		1.812

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.5 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP Menurut Provinsi dan Skala Perusahaan

Tabel 5. 1 Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP Menurut Provinsi dan Skala Perusahaan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja, sampai dengan 30 September 2023

Provinsi	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Tidak Teridentifikasi	Grand Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	19.936	3.221	698	155	3.531	27.541
Bali	41.497	11.725	3.612	644	5.318	62.796
Banten	72.811	20.271	5.518	1.951	16.090	116.641
Bengkulu	10.764	1.724	426	126	1.135	14.175
Daerah Istimewa Yogyakarta	17.780	5.615	1.483	449	3.907	29.234
Dki Jakarta	143.723	52.732	17.564	5.878	54.665	274.562
Gorontalo	4.593	927	235	33	701	6.489
Jambi	16.028	2.585	883	277	2.869	22.642
Jawa Barat	193.260	60.009	13.690	4.788	36.684	308.431
Jawa Tengah	89.576	25.039	6.593	2.389	18.011	141.608
Jawa Timur	150.134	35.131	8.504	2.555	28.760	225.084
Kalimantan Barat	24.828	4.164	1.024	485	4.241	34.742
Kalimantan Selatan	22.335	3.971	1.067	404	3.965	31.742
Kalimantan Tengah	15.133	2.324	616	404	2.237	20.714
Kalimantan Timur	29.126	5.261	1.769	775	7.310	44.241
Kalimantan Utara	6.925	801	205	88	772	8.791
Kepulauan Bangka Belitung	7.778	2.006	533	128	1.185	11.630
Kepulauan Riau	20.547	4.208	1.521	454	5.281	32.011
Lampung	30.262	5.679	1.142	310	4.045	41.438
Maluku	8.152	1.028	271	66	935	10.452
Maluku Utara	5.600	893	143	50	783	7.469
Nusa Tenggara Barat	18.844	4.183	906	136	2.116	26.185
Nusa Tenggara Timur	11.965	2.125	493	69	1.585	16.237
Papua	12.138	2.613	380	99	1.011	16.241
Papua Barat	7.481	1.072	182	57	865	9.657
Riau	30.090	5.082	1.664	794	6.021	43.651
Sulawesi Barat	7.248	1.102	126	26	503	9.005
Sulawesi Selatan	48.205	8.901	1.636	446	4.488	63.676
Sulawesi Tengah	15.906	2.384	551	128	1.805	20.774
Sulawesi Tenggara	16.294	2.572	454	101	1.981	21.402

Provinsi	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Tidak Teridentifikasi	Grand Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	12.115	2.915	719	161	1.923	17.833
Sumatera Barat	22.934	4.166	991	255	3.307	31.653
Sumatera Selatan	27.781	5.893	1.351	487	4.399	39.911
Sumatera Utara	42.597	9.499	2.647	1.012	10.041	65.796
Tidak Teridentifikasi	3.514	1.907	1.496	408	25.168	32.493
Total	1.207.900	303.728	81.093	26.588	267.638	1.886.947

Sumber: Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP), update 30 September 2023

5.6 Jumlah Ahli K3 berdasarkan Spesialisasi

Tabel 5.6 Jumlah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Provinsi dan Spesialisasi

s.d Agustus Tahun 2023

No.	Spesialisasi	Jumlah
1	PAPA	96.791
2	PTP	5.374
3	PUBT	6.539
4	Pengelasan	1.785
5	Listrik	9.332
6	Elevator - Eskalator	1.389
7	Kebakaran	38.817
8	Konstruksi	7.415
9	Kesja	16.253
10	Ketinggian	29.313
11	LKBB	11.346
12	AK3U	36.485
13	SMK3	1.519
14	Penyelaman	187
Jumlah		262.545

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.7 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Ketenagakerjaan

Tabel 5.7 Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa menurut Provinsi dan Kegiatan Pemeriksaan

s.d Triwulan III Tahun 2023

No.	Provinsi	Kegiatan Pemeriksaan				Jumlah
		Pertama	Berkala	Ulang	Khusus	
1	Aceh	71	61	-	2	134
2	Sumatera Utara	68	248	25	235	576
3	Sumatera Barat	-	14	-	33	47
4	Riau	475	290	9	40	814
5	Jambi	80	80	41	-	201
6	Sumatera Selatan	21	22	3	1	47
7	Bengkulu	147	35	5	-	187
8	Lampung	40	6	-	-	46
9	Kep. Bangka Belitung	88	67	-	11	166
10	Kep. Riau	809	67	-	-	876
11	DKI Jakarta	140	41	-	33	30
12	Jawa Barat	594	905	4	88	1.591
13	Jawa Tengah	422	677	13	17	1.129
14	DI Yogyakarta	69	199	-	52	320
15	Jawa Timur	491	728	-	11	1.230
16	Banten	1.611	457	-	40	2.108
17	Bali	1.155	423	-	-	1.578
18	Nusa Tenggara Barat	190	-	-	-	190
19	Nusa Tenggara Timur	-	590	-	-	590
20	Kalimantan Barat	4	4	-	3	7
21	Kalimantan Tengah	355	-	-	-	355
22	Kalimantan Selatan	187	68	-	6	261
23	Kalimantan Timur	-	-	-	10	10
24	Kalimantan Utara	76	-	-	-	76
25	Sulawesi Utara	159	287	-	14	460
26	Sulawesi Tengah	-	57	-	-	57
27	Sulawesi Selatan	432	333	-	16	781
28	Sulawesi Tenggara	-	68	68	-	136
29	Gorontalo	5	21	-	-	26
30	Sulawesi Barat	34	50	-	-	84
31	Maluku	101	204	-	-	305
32	Maluku Utara	19	15	-	-	34
33	Papua Barat	908	160	-	-	1.068
34	Papua	10	10	-	-	20
Jumlah		8.761	6.187	168	612	15.540

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.8 Jumlah Nota Pemeriksaan Perusahaan menurut Provinsi dan Jenis Nota Pemeriksaan

**Tabel 5.8 Jumlah Nota Pemeriksaan menurut Provinsi dan Kegiatan Pembinaan
s.d Triwulan III 2023**

No.	Provinsi	Kegiatan Pembinaan		
		NP. 1	NP.2	NP.III
1	Aceh	118	-	-
2	Sumatera Utara	24	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-
4	Riau	180	-	-
5	Jambi	92	-	-
6	Sumatera Selatan	10	4	-
7	Bengkulu	155	12	-
8	Lampung	51	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	30	4	-
10	Kep. Riau	5	-	-
11	DKI Jakarta	189	25	-
12	Jawa Barat	275	-	-
13	Jawa Tengah	1.025	-	-
14	DI Yogyakarta	191	23	-
15	Jawa Timur	1.188	-	-
16	Banten	231	6	-
17	Bali	1.578	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	306	-	-
20	Kalimantan Barat	11	-	-
21	Kalimantan Tengah	355	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	38	38	-
24	Kalimantan Utara	82	-	-
25	Sulawesi Utara	387	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	190	33	-
28	Sulawesi Tenggara	68	-	-
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	82	4	-
31	Maluku	96	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua Barat	1.068	-	-
34	Papua	5	-	-
Jumlah		8.030	149	-

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.9 Jumlah Perusahaan yang Melanggar Norma Ketenagakerjaan

Tabel 5.9 Jumlah Perusahaan yang Melanggar Norma Ketenagakerjaan menurut Provinsi
s.d Triwulan III Tahun 2023

No.	Provinsi	Perusahaan yang Melanggar
1	Aceh	134
2	Sumatera Utara	121
3	Sumatera Barat	14
4	Riau	192
5	Jambi	82
6	Sumatera Selatan	399
7	Bengkulu	112
8	Lampung	31
9	Kep. Bangka Belitung	121
10	Kep. Riau	213
11	DKI Jakarta	463
12	Jawa Barat	1.299
13	Jawa Tengah	917
14	DI Yogyakarta	78
15	Jawa Timur	885
16	Banten	313
17	Bali	95
18	Nusa Tenggara Barat	9
19	Nusa Tenggara Timur	-
20	Kalimantan Barat	10
21	Kalimantan Tengah	355
22	Kalimantan Selatan	24
23	Kalimantan Timur	-
24	Kalimantan Utara	38
25	Sulawesi Utara	88
26	Sulawesi Tengah	-
27	Sulawesi Selatan	190
28	Sulawesi Tenggara	-
29	Gorontalo	-
30	Sulawesi Barat	53
31	Maluku	96
32	Maluku Utara	-
33	Papua Barat	513
34	Papua	-
Jumlah		6.845

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.10 Jumlah Perusahaan Pelanggar Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang Disidik Menurut Provinsi dan Jenis Pelanggaran

Tabel 5.10. Jumlah Putusan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan menurut Provinsi dan Jenis Pelanggaran

s.d. Juli Tahun 2023

No.	Provinsi	Jenis Pelanggaran										Jumlah
		Tipiring				Biasa						
		WLKP	PP	K3	UU 3/1951	Serikat Pekerja	Pengupahan	Upah	Pesangon	PMI	BPJS	
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Babel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI. Yogyakarta	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Ditjen. Binwasnaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	7

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.11 Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan

Tabel 5.11. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan menurut Provinsi/ Unit Kerja dan Jenjang Jabatan

s.d Juni Tahun 2023

No.	Provinsi	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Utama	Jumlah
1	Aceh	2	20	5	0	27
2	Bali	8	12	2	0	22
3	Banten	24	29	13	0	66
4	Bengkulu	7	11	1	0	19
5	DI Yogyakarta	10	8	3	0	21
6	Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker RI	28	77	28	0	133
7	DKI Jakarta	18	23	6	0	47
8	Gorontalo	2	6	4	0	12
9	Jambi	9	22	2	0	33
10	Jawa Barat	46	78	36	0	160
11	Jawa Tengah	48	74	18	0	140
12	Jawa Timur	40	94	27	0	161
13	Kalimantan Barat	4	13	13	0	30
14	Kalimantan Selatan	2	19	15	0	36
15	Kalimantan Tengah	4	20	2	0	26
16	Kalimantan Timur	7	36	6	0	49
17	Kalimantan Utara	1	1	2	0	4
18	Kep. Bangka Belitung	3	22	2	0	27
19	Kep. Riau	3	30	4	0	37
20	Lampung	12	24	1	0	37
21	Maluku	1	8	12	0	21
22	Maluku Utara	0	6	0	0	6
23	Nusa Tenggara Barat	2	14	1	0	17
24	Nusa Tenggara Timur	0	12	5	0	17
25	Papua	1	12	10	0	23
26	Papua Barat	3	10	1	0	14
27	Riau	13	17	2	1	33
28	Sulawesi Barat	0	7	4	0	11
29	Sulawesi Selatan	24	26	1	0	51
30	Sulawesi Tengah	5	14	2	0	21
31	Sulawesi Tenggara	3	16	0	0	19
32	Sulawesi Utara	14	16	0	1	31
33	Sumatera Barat	12	18	2	0	32
34	Sumatera Selatan	8	21	10	0	39
35	Sumatera Utara	17	26	2	0	45
Jumlah		381	842	242	2	1.467

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.12 Jumlah Penguji K3

Tabel 5.12. Jumlah Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Unit Kerja, Jenis Kelamin, dan Jenjang

s.d. Juni Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenjang				Jumlah
		L	P		Pertama	Muda	Madya	Utama	
1	Balai Besar Pengembangan K3 Makassar	9	14	23	7	11	5		23
2	Balai K3 Bandung	7	16	23	11	7	5		23
3	Balai K3 Jakarta	6	9	15	6	4	5		15
4	Balai K3 Medan	7	3	10	5	5	0		10
5	Balai K3 Samarinda	5	4	9	5	2	2		9
6	UPT Keselamatan Kerja Prov. Jawa Timur	6	13	19	12	2	5		19
7	BLU Balai Kesehatan Penerbangan, Kementerian Perhubungan	0	1	1	0	1	0		1
8	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, NTB	1	1	2	1	1	0		2
9	Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3	3	1	4	0	4	0		4
10	Direktorat Bina Pengujian K3	8	18	26	10	10	6		26
11	Sekretariat Ditjen Binwasnaker dan K3	0	1	1	0	1	0		1
12	UPTD Balai Hiperkes dan KK Prov. Sumatera Selatan	2	0	2	0	1	1		2
13	UPTD Balai K3 Prov. DI Yogyakarta	4	4	8	2	4	2		8
14	UPTD Balai Keselamatan Kerja Prov. Jawa Tengah	10	6	16	1	4	11		16
15	UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov. Sulawesi Utara	0	1	1	0	1	0		1
16	UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja Prov. Sumatera Barat	0	4	4	2	2	0		4
17	UPTD Laboratorium Kesehatan Kerja Disnakertrans Prov. Kalimantan Barat	1	3	4	1	2	1		4
18	UPTD Hiperkes & Keselamatan Kerja Disnaker dan ESDM Provinsi Bali	1	0	1	0	0	1		1
19	UPTD Balai K3 Prov. Lampung	2	1	3	0	0	3		3
20	Disnakertrans Prov. Bangka Belitung	1	1	2	2	0	0		2
Jumlah		73	101	174	65	62	47	0	174

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

5.13 Jumlah Kecelakaan Kerja

Tabel 5.13. Jumlah Kecelakaan Kerja menurut Provinsi, Kasus Klaim, dan Nilai Klaim

s.d. Agustus Tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah Klaim					
		Kasus			Nilai Rupiah		
		PU	BPU	Jakon	PU	BPU	Jakon
1	Aceh	440	79	5	6.490.772.140	672.344.610	263.999.320
2	Sumatera Utara	13.798	432	110	78.981.990.010	3.214.491.650	2.348.099.890
3	Sumatera Barat	3.146	252	46	17.137.845.660	1.324.718.840	599.721.970
4	Riau	19.365	389	120	126.205.572.130	4.735.574.970	3.964.292.740
5	Kepulauan Riau	12.481	363	121	79.824.473.030	1.781.191.360	1.675.409.990
6	Jambi	2.294	126	14	13.812.883.080	1.111.843.700	294.287.800
7	Sumatera Selatan	4.089	139	4	37.213.205.580	1.140.724.670	177.912.600
8	Kep. Bangka Belitung	768	40	5	6.456.096.980	219.562.030	174.348.060
9	Bengkulu	584	39	5	2.506.082.210	354.138.220	86.430.640
10	Lampung	1.996	97	1	16.719.426.510	771.048.510	21.340.500
11	DKI Jakarta	13.564	1.132	222	259.113.710.050	19.044.145.270	6.806.557.030
12	Jawa barat	38.821	1.687	244	354.134.619.520	19.601.583.420	3.954.372.550
13	Banten	20.127	730	263	191.614.103.870	8.749.750.170	3.105.003.750
14	Jawa Tengah	27.979	1.434	152	113.073.508.595	10.991.859.350	1.415.882.920
15	DI Yogyakarta	4.129	379	22	15.744.275.060	1.664.834.420	507.044.650
16	Jawa Timur	34.224	1.564	305	264.126.284.183	13.992.155.900	5.174.400.060
17	Bali	4.879	1.366	46	36.488.235.120	9.387.893.380	854.846.220
18	Nusa Tenggara Barat	269	117	9	6.440.114.330	915.065.400	309.430.090
19	Nusa Tenggara Timur	111	29	20	2.471.419.690	544.462.760	530.986.010
20	Kalimantan Barat	2.161	302	15	20.778.284.850	2.000.747.490	394.148.780
21	Kalimantan Tengah	5.815	97	6	42.976.174.970	404.339.220	382.670.770
22	Kalimantan Selatan	2.765	187	24	24.460.117.990	714.405.010	409.177.160
23	Kalimantan Timur	6.020	222	49	40.605.457.760	1.371.586.130	932.722.940
24	Kalimantan Utara	423	86	7	7.265.955.150	1.099.198.550	240.008.740
25	Sulawesi Utara	407	37	11	7.151.747.230	827.073.730	641.208.930
26	Gorontalo	2.059	36	15	11.160.332.940	545.457.170	306.479.430
27	Sulawesi Tengah	136	44	-	1.440.367.810	640.444.240	-
28	Sulawesi Selatan	1.121	175	63	14.291.909.740	1.888.902.200	976.254.740
29	Sulawesi Barat	31	15	3	794.948.250	110.567.860	161.000.000
30	Sulawesi Tenggara	371	25	4	9.209.863.590	201.043.410	36.920.490
31	Maluku	77	11	3	3.447.196.830	129.408.480	4.577.060
32	Maluku Utara	327	16	5	3.861.979.140	26.588.880	175.298.750
33	Papua	621	32	12	6.572.313.650	396.424.990	970.757.660
34	Papua Barat	348	23	3	3.325.805.770	209.984.820	345.550.400
Jumlah		225.746	11.702	1.934	1.825.897.073.418	110.783.560.810	38.241.142.640

Sumber: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI

BAB VI

KETENAGAKERJAAN UMUM

Tabel 6.1.1
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama
Februari 2023

Provinsi	Kegiatan Utama							
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Total
	Bekerja	Penganggur terbuka	Jumlah	Sekolah	Mengurus rumah tangga	lainnya	Jumlah	
Aceh	2.449.956	149.439	2.599.395	368.507	814.140	209.490	1.392.137	3.991.532
SumateraUtara	7.461.156	412.526	7.873.682	894.476	1.969.420	415.730	3.279.626	11.153.308
SumateraBarat	2.822.543	176.968	2.999.511	389.640	683.847	214.698	1.288.185	4.287.696
Riau	3.041.629	135.050	3.176.679	461.936	1.044.519	190.378	1.696.833	4.873.512
Jambi	1.768.653	83.383	1.852.036	249.359	546.708	80.273	876.340	2.728.376
SumateraSelatan	4.290.172	203.765	4.493.937	489.058	1.229.739	232.443	1.951.240	6.445.177
Bengkulu	1.093.853	36.320	1.130.173	136.695	228.021	59.276	423.992	1.554.165
Lampung	4.794.031	209.110	5.003.141	518.251	1.235.015	185.573	1.938.839	6.941.980
Bangka-Belitung	774.011	31.339	805.350	72.789	250.753	16.164	339.706	1.145.056
KepulauanRiau	1.023.125	84.228	1.107.353	146.539	329.236	62.455	538.230	1.645.583
DKIJakarta	4.857.619	397.623	5.255.242	863.811	1.704.118	509.093	3.077.022	8.332.264
JawaBarat	23.394.824	2.005.166	25.399.990	3.162.367	8.158.003	1.332.131	12.652.501	38.052.491
JawaTengah	19.959.942	1.104.348	21.064.290	2.017.734	5.017.203	1.024.237	8.059.174	29.123.464
DIYogyakarta	2.153.901	79.908	2.233.809	252.415	442.555	113.142	808.112	3.041.921
JawaTimur	22.404.793	1.013.234	23.418.027	2.369.257	5.906.444	1.060.300	9.336.001	32.754.028
Banten	5.617.303	486.354	6.103.657	728.753	1.891.560	531.905	3.152.218	9.255.875
Bali	2.624.806	101.821	2.726.627	267.817	445.388	92.627	805.832	3.532.459
NusaTenggaraBarat	2.760.322	106.802	2.867.124	284.961	742.533	134.233	1.161.727	4.028.851
NusaTenggaraTimur	2.819.453	90.306	2.909.759	361.227	479.353	154.603	995.183	3.904.942
KalimantanBarat	2.730.308	129.220	2.859.528	339.888	825.007	152.936	1.317.831	4.177.359
KalimantanTengah	1.384.472	55.351	1.439.823	146.496	446.880	60.815	654.191	2.094.014
KalimantanSelatan	2.075.988	85.298	2.161.286	246.570	590.898	109.779	947.247	3.108.533
KalimantanTimur	1.808.972	123.058	1.932.030	276.774	642.894	90.669	1.010.337	2.942.367
KalimantanUtara	357.777	15.292	373.069	60.224	100.198	23.062	183.484	556.553
SulawesiUtara	1.229.861	81.121	1.310.982	148.075	504.912	106.670	759.657	2.070.639
SulawesiTengah	1.542.479	55.797	1.598.276	165.337	430.856	82.635	678.828	2.277.104
SulawesiSelatan	4.315.849	239.589	4.555.438	583.096	1.621.876	316.255	2.521.227	7.076.665
SulawesiTenggara	1.282.632	48.724	1.331.356	175.990	394.099	69.608	639.697	1.971.053
Gorontalo	622.929	19.742	642.671	71.295	159.023	37.468	267.786	910.457
SulawesiBarat	696.147	21.854	718.001	85.306	213.826	44.739	343.871	1.061.872
Maluku	846.921	54.850	901.771	120.322	265.030	125.905	511.257	1.413.028
MalukuUtara	616.231	29.716	645.947	92.619	186.981	45.457	325.057	971.004
PapuaBarat	588.729	34.461	623.190	84.967	147.108	43.232	275.307	898.497
Papua	2.421.124	87.512	2.508.636	155.282	466.584	136.545	758.411	3.267.047
Total	138.632.511	7.989.275	146.621.786	16.787.833	40.114.727	8.064.526	64.967.086	211.588.872

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2023, diolah Pusdatik Naker

Tabel 6.1.2
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Provinsi dan Kepesertaan Pada Pelatihan/Kursus
Februari 2023

Provinsi	Pernah ikut pelatihan atau kursus dan mendapatkan sertifikat ?			
	Pernah dan mendapatkan sertifikat	Pernah tetapi tidak mendapatkan sertifikat	Tidak pernah	Total
Aceh	407.071	136.984	3.447.477	3.991.532
Sumatera Utara	1.347.816	491.158	9.314.334	11.153.308
Sumatera Barat	982.674	189.332	3.115.690	4.287.696
Riau	746.504	139.546	3.987.462	4.873.512
Jambi	353.826	81.668	2.292.882	2.728.376
Sumatera Selatan	681.195	234.163	5.529.819	6.445.177
Bengkulu	217.651	60.791	1.275.723	1.554.165
Lampung	716.338	228.375	5.997.267	6.941.980
Bangka-Belitung	229.091	53.688	862.277	1.145.056
Kepulauan Riau	414.863	53.800	1.176.920	1.645.583
DKI Jakarta	1.873.835	317.088	6.141.341	8.332.264
Jawa Barat	4.350.655	1.534.976	32.166.860	38.052.491
Jawa Tengah	2.969.580	1.602.279	24.551.605	29.123.464
DI Yogyakarta	625.645	136.287	2.279.989	3.041.921
Jawa Timur	3.421.284	1.051.612	28.281.132	32.754.028
Banten	756.874	297.959	8.201.042	9.255.875
Bali	822.754	149.116	2.560.589	3.532.459
Nusa Tenggara Barat	652.187	225.782	3.150.882	4.028.851
Nusa Tenggara Timur	446.794	142.761	3.315.387	3.904.942
Kalimantan Barat	416.584	64.134	3.696.641	4.177.359
Kalimantan Tengah	260.364	44.161	1.789.489	2.094.014
Kalimantan Selatan	565.345	79.204	2.463.984	3.108.533
Kalimantan Timur	734.436	100.056	2.107.875	2.942.367
Kalimantan Utara	89.550	9.609	457.394	556.553
Sulawesi Utara	306.839	60.280	1.703.520	2.070.639
Sulawesi Tengah	313.365	96.290	1.867.449	2.277.104
Sulawesi Selatan	999.557	241.563	5.835.545	7.076.665
Sulawesi Tenggara	348.586	52.829	1.569.638	1.971.053
Gorontalo	129.029	29.838	751.590	910.457
Sulawesi Barat	141.095	31.533	889.244	1.061.872
Maluku	204.081	34.671	1.174.276	1.413.028
Maluku Utara	116.611	24.107	830.286	971.004
Papua Barat	150.066	38.456	709.975	898.497
Papua	266.241	41.042	2.959.764	3.267.047
Total	27.058.386	8.075.138	176.455.348	211.588.872

Tabel 6.1.3
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	89.429.628	57.192.158	146.621.786
<i>Bekerja</i>	84.217.527	54.414.984	138.632.511
<i>Penganggur terbuka</i>	5.212.101	2.777.174	7.989.275
Bukan Angkatan Kerja	17.060.582	47.906.504	64.967.086
<i>Sekolah</i>	8.247.513	8.540.320	16.787.833
<i>Mengurus rumah tangga</i>	3.544.761	36.569.966	40.114.727
<i>lainnya</i>	5.268.308	2.796.218	8.064.526
Total Penduduk Usia Kerja	106.490.210	105.098.662	211.588.872

Tabel 6.1.4
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Daerah Tempat Tinggal
Februari 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
Angkatan Kerja	80.720.559	65.901.227	146.621.786
<i>Bekerja</i>	74.982.087	63.650.424	138.632.511
<i>Penganggur terbuka</i>	5.738.472	2.250.803	7.989.275
Bukan Angkatan Kerja	39.816.388	25.150.698	64.967.086
<i>Sekolah</i>	10.494.594	6.293.239	16.787.833
<i>Mengurus rumah tangga</i>	24.241.428	15.873.299	40.114.727
<i>lainnya</i>	5.080.366	2.984.160	8.064.526
Total Penduduk Usia Kerja	106.490.210	105.098.662	211.588.872

Tabel 6.1.5
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan
Februari 2023

Kegiatan Utama	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan						Total
	<=SD	SMP	SMU	SMK	Diploma I / II / III	D IV/S1/S2/S3	
Angkatan Kerja	56.840.415	26.725.730	28.803.393	17.352.171	3.245.735	13.654.342	146.621.786
<i>Bekerja</i>	55.124.748	25.280.029	26.587.392	15.685.678	3.054.054	12.900.610	138.632.511
<i>Penganggur terbuka</i>	1.715.667	1.445.701	2.216.001	1.666.493	191.681	753.732	7.989.275
Bukan Angkatan Kerja	25.227.222	19.692.984	11.908.098	4.670.433	908.849	2.559.500	64.967.086
<i>Sekolah</i>	2.974.923	10.495.397	2.560.402	644.894	29.198	83.019	16.787.833
<i>Mengurus rumah tangga</i>	17.851.883	8.097.388	7.961.046	3.462.773	762.379	1.979.258	40.114.727
<i>lainnya</i>	4.400.416	1.100.199	1.386.650	562.766	117.272	497.223	8.064.526
Total Penduduk Usia Kerja	82.067.637	46.418.714	40.711.491	22.022.604	4.154.584	16.213.842	211.588.872

Tabel 6.1.6
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Kepesertaan Pada Pelatihan/Kursus
Februari 2023

Kegiatan Utama	Pernah ikut pelatihan atau kursus dan mendapatkan sertifikat			
	Pernah dan mendapatkan sertifikat	Pernah tetapi tidak mendapatkan sertifikat	Tidak pernah	Total
Angkatan Kerja	21.754.356	6.232.206	118.635.224	146.621.786
<i>Bekerja</i>	20.537.715	5.843.250	112.251.546	138.632.511
<i>Penganggur terbuka</i>	1.216.641	388.956	6.383.678	7.989.275
Bukan Angkatan Kerja	5.304.030	1.842.932	57.820.124	64.967.086
<i>Sekolah</i>	982.846	308.996	15.495.991	16.787.833
<i>Mengurus rumah tangga</i>	3.580.686	1.385.691	35.148.350	40.114.727
<i>lainnya</i>	740.498	148.245	7.175.783	8.064.526
Total Penduduk Usia Kerja	27.058.386	8.075.138	176.455.348	211.588.872

Tabel 6.1.7
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) di Indonesia
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Utama
Februari 2023

Kelompok Umur	Kegiatan Utama							
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Total
	Bekerja	Penganggur terbuka	Jumlah	Sekolah	Mengurus rumah tangga	lainnya	Jumlah	
15-19 tahun	4.668.215	1.123.495	5.791.710	14.360.756	1.284.327	713.425	16.358.508	22.150.218
20-24 tahun	13.195.089	2.397.136	15.592.225	2.301.080	3.715.990	810.718	6.827.788	22.420.013
25-29 tahun	16.000.069	1.213.435	17.213.504	97.885	4.773.411	427.847	5.299.143	22.512.647
30-34 tahun	16.405.596	761.951	17.167.547	22.481	4.676.747	248.895	4.948.123	22.115.670
35-39 tahun	16.493.906	670.266	17.164.172	1.582	4.024.563	195.330	4.221.475	21.385.647
40-44 tahun	15.987.583	680.071	16.667.654	2.750	3.528.183	195.785	3.726.718	20.394.372
45-49 tahun	14.997.739	612.643	15.610.382	1.053	3.111.212	241.143	3.353.408	18.963.790
50-54 tahun	13.362.946	187.669	13.550.615	246	2.825.611	376.457	3.202.314	16.752.929
55-59 tahun	10.646.349	149.835	10.796.184	-	2.958.545	484.711	3.443.256	14.239.440
60-64 tahun	7.492.696	81.798	7.574.494	-	2.977.223	807.574	3.784.797	11.359.291
65 tahun +	9.382.323	110.976	9.493.299	-	6.238.915	3.562.641	9.801.556	19.294.855
Total	138.632.511	7.989.275	146.621.786	16.787.833	40.114.727	8.064.526	64.967.086	211.588.872

Tabel 6.1.8
Penduduk Yang Bekerja di Indonesia
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2023

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	17.188.137	11.465.088	28.653.225
Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	15.895.149	6.463.672	22.358.821
Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	3.897.553	1.008.121	4.905.674
Buruh/karyawan/pegawai	32.536.216	17.847.022	50.383.238
Pekerja bebas di pertanian	3.632.125	2.096.937	5.729.062
Pekerja bebas di nonpertanian	5.752.690	839.260	6.591.950
Pekerja keluarga/tidak dibayar	5.315.657	14.694.884	20.010.541
Total	84.217.527	54.414.984	138.632.511

Tabel 6.1.9
Penduduk Yang Bekerja di Indonesia
Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2023

Jenis Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
TNI / POLRI	478.780	33.429	512.209
Manajer	1.818.180	802.074	2.620.254
Profesional	3.254.362	4.887.458	8.141.820
Teknisi dan Asisten Profesional	2.697.255	1.265.493	3.962.748
Tenaga Tata Usaha	3.233.248	2.502.357	5.735.605
Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	16.351.920	18.175.839	34.527.759
Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.569.231	11.016.537	30.585.768
Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI	10.510.380	5.316.799	15.827.179
Operator dan Perakit Mesin	8.181.233	1.121.182	9.302.415
Pekerja Kasar	18.122.938	9.293.816	27.416.754
Total	84.217.527	54.414.984	138.632.511

Tabel 6.1.10
Penduduk Yang Bekerja di Indonesia
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	25.209.895	15.484.677	40.694.572
Pertambangan & Penggalian	1.568.592	128.319	1.696.911
Industri Pengolahan	10.857.134	7.972.863	18.829.997
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin	296.355	60.793	357.148
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan Material Sampah, & Aktivitas Remediasi	456.509	112.095	568.604
Konstruksi	8.468.621	137.127	8.605.748
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	13.769.054	12.469.760	26.238.814
Pengangkutan & Pergudangan	5.488.922	346.249	5.835.171
Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	4.108.581	6.038.237	10.146.818
Informasi & Komunikasi	807.155	385.327	1.192.482
Aktivitas Keuangan & Asuransi	1.073.777	526.376	1.600.153
Real Estat	361.921	115.354	477.275
Jasa Profesional & Perusahaan	1.640.998	416.273	2.057.271
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3.291.940	1.423.289	4.715.229
Pendidikan	2.545.351	4.190.727	6.736.078
Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	1.040.277	1.436.288	2.476.565
Jasa Lainnya	3.232.445	3.171.230	6.403.675
Total	84.217.527	54.414.984	138.632.511

Tabel 6.1.11
Pengangguran Terbuka di Indonesia
Menurut Provinsi dan Kategori Pengangguran
Februari 2023

Provinsi	Kategori pengangguran terbuka				
	mencari pekerjaan	mempersiapkan usaha	putus asa/merasa tdk mungkin mendapatkan pekerjaan	sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja	Total
11 Aceh	122.403	7.391	9.690	9.955	149.439
12 Sumatera Utara	344.235	6.152	40.908	21.231	412.526
13 Sumatera Barat	156.308	8.989	4.363	7.308	176.968
14 Riau	107.136	12.646	3.665	11.603	135.050
15 Jambi	66.281	7.165	4.593	5.344	83.383
16 Sumatera Selatan	174.161	7.190	9.612	12.802	203.765
17 Bengkulu	31.153	247	3.719	1.201	36.320
18 Lampung	185.834	11.670	3.574	8.032	209.110
19 Bangka-Belitung	26.058	868	1.745	2.668	31.339
21 Kepulauan Riau	69.130	544	11.383	3.171	84.228
31 DKI Jakarta	320.213	16.675	14.587	46.148	397.623
32 Jawa Barat	1.699.000	50.830	146.155	109.181	2.005.166
33 Jawa Tengah	879.294	44.331	130.926	49.797	1.104.348
34 D I Yogyakarta	53.815	4.365	19.650	2.078	79.908
35 Jawa Timur	889.110	32.091	48.758	43.275	1.013.234
36 Banten	344.091	22.755	99.513	19.995	486.354
51 Bali	82.563	6.065	4.002	9.191	101.821
52 Nusa Tenggara Barat	93.087	2.467	3.146	8.102	106.802
53 Nusa Tenggara Timur	71.747	4.395	7.285	6.879	90.306
61 Kalimantan Barat	106.273	940	10.706	11.301	129.220
62 Kalimantan Tengah	41.216	1.389	9.143	3.603	55.351
63 Kalimantan Selatan	71.501	3.319	6.902	3.576	85.298
64 Kalimantan Timur	108.314	8.799	669	5.276	123.058
65 Kalimantan Utara	13.843	641	253	555	15.292
71 Sulawesi Utara	67.534	4.729	3.306	5.552	81.121
72 Sulawesi Tengah	46.510	1.544	3.811	3.932	55.797
73 Sulawesi Selatan	200.673	6.082	17.310	15.524	239.589
74 Sulawesi Tenggara	39.822	1.376	5.335	2.191	48.724
75 Gorontalo	19.311	-	-	431	19.742
76 Sulawesi Barat	14.030	489	-	7.335	21.854
81 Maluku	36.158	2.142	12.071	4.479	54.850
82 Maluku Utara	23.671	527	1.893	3.625	29.716
91 Papua Barat	26.661	1.442	5.470	888	34.461
94 Papua	67.004	4.409	12.511	3.588	87.512
Total	6.598.140	284.664	656.654	449.817	7.989.275

Tabel 6.1.12
Pengangguran Terbuka di Indonesia
Menurut Pendidikan dan Kategori Pengangguran
Februari 2023

Pendidikan	Kategori pengangguran terbuka				
	mencari pekerjaan	mempersiapkan usaha	putus asa/merasa tdk mungkin mendapatkan pekerjaan	sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja	Total
<=SD	1.273.850	79.265	258.149	104.403	1.715.667
SMP	1.144.138	58.648	149.822	93.093	1.445.701
SMU	1.865.343	72.738	164.789	113.131	2.216.001
SMK	1.499.940	35.593	57.259	73.701	1.666.493
Diploma I / II / III / D IV	175.166	12.502	5.202	13.524	206.394
/S1/S2/S3	639.703	25.918	21.433	51.965	739.019
Total	6.598.140	284.664	666.654	449.817	7.989.275

Tabel 6.1.13
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja di Indonesia
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Februari 2023

Status Pekerjaan Utama	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Buruh/karyawan/pegawai	3.230.358	2.423.480	2.944.541
Pekerja bebas di pertanian	1.349.966	846.349	1.165.633
Pekerja bebas di nonpertanian	2.001.540	956.543	1.868.495
Pekerja	2.898.810	2.205.117	2.668.887

Tabel 6.1.14
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja di Indonesia
Menurut Pendidikan dan Status Pekerjaan Utama
Februari 2023

Pendidikan	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan			
	Buruh/karyawan/ pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di nonpertanian	Pekerja
<=SD	1.901.210	1.118.057	1.873.966	1.681.983
SMP	2.235.533	1.311.957	1.847.282	2.092.491
SMU	2.790.116	1.529.141	1.938.274	2.699.473
SMK	2.931.141	1.399.095	1.818.783	2.852.700
Diploma I / II / III	3.727.710	2.086.371	1.189.681	3.696.399
D IV/S1/S2/S3	4.460.185	1.518.128	1.581.959	4.451.054
Total	2.944.541	1.165.633	1.868.495	2.668.887

Tabel 6.1.15
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja di Indonesia
Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama
Februari 2023

Jenis Pekerjaan Utama	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan			
	Buruh/karyawan/ pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di nonpertanian	Total Pekerja
TNI / POLRI	5.799.761			5.799.761
Manajer	6.889.135	900.000	1.255.874	6.866.522
Profesional	3.296.794		2.734.887	3.292.812
Teknisi dan Asisten Profesional	4.585.328	1.000.240	1.916.823	4.525.204
Tenaga Tata Usaha	3.489.293	1.008.263	1.942.926	3.477.762
Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	2.429.235	1.695.375	1.348.998	2.390.392
Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.999.788	1.229.756		1.604.486
Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI	2.551.857	1.358.968	2.182.984	2.482.412
Operator dan Perakit Mesin	3.189.978	1.659.185	1.980.614	3.084.053
Pekerja Kasar	2.109.474	1.141.929	1.770.839	1.817.496
Total	2.944.541	1.165.633	1.868.495	2.668.887

Tabel 6.1.16
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja di Indonesia
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama
Februari 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan			
	Buruh/karyawan/ pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di nonpertanian	Total Pekerja
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.062.328	1.165.633		1.476.776
Pertambangan & Penggalian	4.591.764		1.657.161	4.118.684
Industri Pengolahan	2.963.061		1.274.663	2.860.854
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin	4.261.802		1.150.741	4.077.076
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan Material Sampah,	2.605.373		1.423.422	2.448.258
Konstruksi	3.050.337		2.238.427	2.671.902
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	2.496.098		1.443.093	2.401.359
Pengangkutan & Pergudangan	3.583.428		1.824.127	3.313.968
Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	2.145.400		1.059.674	2.091.597
Informasi & Komunikasi	4.365.911		1.116.972	4.223.365
Aktivitas Keuangan & Asuransi	4.811.289		2.829.706	4.802.349
Real Estat	4.824.840		1.963.013	4.718.149
Jasa Profesional & Perusahaan	3.553.175		1.318.080	3.394.352
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3.880.060			3.880.060
Pendidikan	2.473.647		1.547.164	2.470.121
Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	3.556.947		1.180.418	3.508.954
Jasa Lainnya	1.790.306		1.339.768	1.712.422
Total	2.944.541	1.165.633	1.868.495	2.668.887

Tabel 6.1.17
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja di Indonesia
Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama
Februari 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan			
	Buruh/karyawan/ pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di nonpertanian	Total Pekerja
11 Aceh	2.294.901	1.413.750	1.559.605	2.097.342
12 Sumatera Utara	2.393.548	1.664.393	1.657.912	2.268.667
13 Sumatera Barat	2.603.514	1.370.475	1.750.915	2.371.254
14 Riau	2.872.526	1.622.069	1.948.335	2.652.148
15 Jambi	2.524.049	1.734.150	2.120.446	2.402.646
16 Sumatera Selatan	2.606.420	1.101.739	1.904.067	2.510.653
17 Bengkulu	2.363.579	1.034.278	1.567.901	2.067.477
18 Lampung	2.193.447	1.107.619	1.607.102	1.848.064
19 Bangka-Belitung	2.986.225	1.687.397	1.904.176	2.878.327
21 Kepulauan Riau	4.143.219	1.463.720	2.159.338	4.112.060
31 DKI Jakarta	5.071.094		2.268.923	4.986.058
32 Jawa Barat	3.333.558	1.173.309	2.058.043	2.939.347
33 Jawa Tengah	2.178.167	1.081.778	1.864.077	2.036.148
34 D I Yogyakarta	2.374.873	811.826	1.476.971	2.246.993
35 Jawa Timur	2.516.620	1.013.684	1.697.541	2.185.100
36 Banten	3.732.183	1.000.058	2.281.119	3.450.962
51 Bali	3.200.254	1.300.655	2.026.097	3.036.240
52 Nusa Tenggara Barat	2.201.507	801.225	1.840.891	1.985.913
53 Nusa Tenggara Timur	2.140.724	504.867	885.925	2.027.446
61 Kalimantan Barat	2.699.931	1.642.663	2.169.391	2.645.677
62 Kalimantan Tengah	3.129.693	1.745.081	1.892.684	3.027.383
63 Kalimantan Selatan	2.971.235	1.616.119	1.599.355	2.817.691
64 Kalimantan Timur	3.946.735	2.191.835	2.229.436	3.844.625
65 Kalimantan Utara	3.550.356	1.682.793	1.751.611	3.289.477
71 Sulawesi Utara	3.217.409	1.745.474	1.832.847	2.926.396
72 Sulawesi Tengah	2.568.687	1.239.797	1.636.942	2.337.282
73 Sulawesi Selatan	2.825.303	882.772	1.811.153	2.672.886
74 Sulawesi Tenggara	2.653.241	1.604.269	1.881.111	2.554.246
75 Gorontalo	2.590.343	1.039.504	1.876.378	2.199.615
76 Sulawesi Barat	2.117.920	1.259.282	1.772.002	2.029.796
81 Maluku	3.005.359	1.185.599	1.785.622	2.912.536
82 Maluku Utara	3.015.999	1.001.558	1.206.588	2.673.306
91 Papua Barat	3.307.020	1.480.403	2.275.387	3.268.287
94 Papua	4.153.146	1.190.262	2.663.951	4.014.594
Total	2.944.541	1.165.633	1.868.495	2.668.887

Tabel 6.1.18
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja di Indonesia
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal
Februari 2023

Status Pekerjaan Utama	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Buruh/karyawan/pegawai	3.255.312	2.222.265	2.944.541
Pekerja bebas di pertanian	1.118.058	1.184.607	1.165.633
Pekerja bebas di nonpertanian	1.863.818	1.874.717	1.868.495
Total Pekerja	3.040.475	1.985.275	2.668.887

Tabel 6.1.19
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja di Indonesia
Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan Utama
Februari 2023

Kelompok Umur	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan			
	Buruh/karyawan/pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di nonpertanian	Total Pekerja
15-19 tahun	1.764.800	1.096.943	1.291.473	1.682.932
20-24 tahun	2.311.432	1.318.933	1.620.099	2.230.159
25-29 tahun	2.649.437	1.176.947	1.899.320	2.518.580
30-34 tahun	2.960.917	1.312.012	1.901.268	2.760.106
35-39 tahun	3.225.141	1.320.810	1.868.858	2.969.993
40-44 tahun	3.323.249	1.238.222	2.065.792	2.967.181
45-49 tahun	3.333.395	1.176.873	2.028.537	2.930.809
50-54 tahun	3.656.310	1.113.055	1.981.897	3.101.498
55-59 tahun	3.613.046	1.108.718	1.715.152	2.902.030
60-64 tahun	2.521.126	1.052.996	1.758.495	1.874.156
65 tahun +	2.079.768	978.962	1.267.364	1.557.771
Total	2.944.541	1.165.633	1.868.495	2.668.887

BAB VII

BANTUAN PEMERINTAH

Tabel 7. 1 Jumlah Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja Menurut Provinsi dan Batch, Tahun 2023

PROVINSI DOMISILI	BATCH															TOTAL
	48 (2)	49 (3)	50 (4)	51 (5)	52 (6)	53 (7)	54 (8)	55 (9)	56 (10)	57 (11)	58 (12)	59 (13)	60 (14)	61 (15)	(16)	
ACEH	187	942	1.132	1.532	1.779	2.039	2.001	2.173	1.013	502	2.385	2.490	4.067	828	23.070	
BALI	162	785	955	1.264	664	534	711	343	377	346	778	493	796	587	8.795	
BANTEN	637	3.178	3.788	5.076	5.812	6.496	6.449	6.746	3.344	1.674	7.821	7.961	12.526	2722	74.230	
BENGKULU	46	229	279	376	448	520	495	558	255	124	606	642	1.165	203	5.946	
DI YOGYAKAR TA	114	577	687	942	1.037	1.050	1.065	976	550	284	1.292	1.307	1.233	466	11.580	
DKI JAKARTA	451	2.241	2.683	3.597	4.152	5.170	5.169	5.281	2.610	1.355	6.304	6.318	9.260	2206	56.797	
GORONTAL O	19	98	116	158	182	258	255	128	119	68	279	168	207	111	2.166	
JAMBI	102	517	621	833	966	1.116	1.098	1.183	566	283	1.332	1.365	2.216	462	12.660	
JAWA BARAT	2.542	12.759	15.385	20.534	23.611	26.533	26.278	27.568	13.522	6.837	31.694	32.529	39.303	11237	290.332	
JAWA TENGAH	1.262	6.389	7.707	10.338	11.822	14.345	14.171	14.942	7.294	3.652	17.130	17.626	21.153	6129	153.960	
JAWA TIMUR	1.489	7.480	8.987	11.989	13.754	13.367	13.201	14.037	6.808	3.424	16.006	16.497	25.878	5632	158.549	
KALIMANTA N BARAT	162	804	968	1.277	1.475	1.302	1.376	732	794	431	1.533	1.143	1.355	699	14.051	
KALIMANTA N SELATAN	123	616	742	1.010	1.149	1.143	1.123	922	575	284	1.352	1.301	1.374	475	12.189	
KALIMANTA N TENGAH	74	354	429	570	648	506	602	300	358	184	611	409	487	296	5.828	
KALIMANTA N TIMUR	124	632	749	1.009	1.139	969	1.301	688	786	408	1.518	923	1.523	681	12.450	
KALIMANTA N UTARA	19	95	117	135	146	127	178	50	95	53	116	81	72	69	1.353	

PROVINSI DOMISILI	BATCH															TOTAL	
	48 (2)	49 (3)	50 (4)	51 (5)	52 (6)	53 (7)	54 (8)	55 (9)	56 (10)	57 (11)	58 (12)	59 (13)	60 (14)	61 (15)	(16)		
(1)																	
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	42	220	261	350	397	240	329	176	176	102	355	262	300	173	3.383		
KEPULAUAN RIAU	129	631	757	1.002	869	760	907	417	497	296	1.006	660	930	471	9.332		
LAMPUNG	246	1.242	1.500	2.003	2.345	2.861	2.792	3.072	1.426	703	3.368	3.574	6.288	1160	32.580		
MALUKU	70	348	420	493	274	296	345	204	199	179	370	208	293	268	3.967		
MALUKU UTARA	29	146	172	146	85	116	109	65	144	96	108	96	96	121	1.529		
NUSA TENGGA BARAT	95	492	587	792	921	1.455	1.409	1.483	721	360	1.677	1.747	1.857	592	14.188		
NUSA TENGGA TIMUR	126	631	754	1.017	1.145	1.149	1.123	799	581	293	1.355	1.130	1.327	494	11.924		
PAPUA	63	51	56	29	20	56	55	3	45	76	52	35	39	56	636		
PAPUA BARAT	33	163	72	52	23	37	50	5	28	36	19	14	21	36	589		
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	60	51	116		
PAPUA PEGUNUNG AN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	13		
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	9	5	7	23		
PAPUA TENGAH	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	5	85	148	243		
RIAU	174	866	1.048	1.408	1.621	1.827	1.789	1.928	913	459	2.145	2.226	3.602	755	20.761		
SULAWESI	20	105	126	170	199	288	283	304	148	72	341	349	435	120	2.960		

PROVINSI DOMISILI	BATCH															TOTAL
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
BARAT																
SULAWESI SELATAN	243	1.233	1.481	1.974	2.269	3.123	3.069	2.148	1.587	808	3.713	3.337	3.944	1336	30.265	
SULAWESI TENGAH	57	294	353	470	546	732	715	760	376	186	870	889	1.018	309	7.575	
SULAWESI TENGGAH	57	279	336	445	507	628	632	492	321	162	749	740	687	270	6.305	
SULAWESI UTARA	97	482	585	760	423	368	542	355	271	267	616	475	568	445	6.254	
SUMATERA BARAT	210	1.053	1.279	1.725	2.005	2.363	2.307	2.467	1.174	579	2.760	2.865	4.597	974	26.358	
SUMATERA SELATAN	247	1.251	1.502	2.015	2.366	2.827	2.752	3.032	1.402	681	3.324	3.495	5.937	1133	31.964	
SUMATERA UTARA	549	2.817	3.366	4.507	5.201	5.399	5.318	5.663	2.720	1.366	6.414	6.622	10.291	2273	62.506	
TOTAL	10.00	50.00	60.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	51.79	26.63	120.00	120.00	165.00	4399	1.117.4	
	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	8	26	

Sumber: Manajemen Pelaksanaan Program Kartu Prakerja, diolah Pusdatik Kemnaker (update 27 September 2023)